

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG



PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 20
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2024-2026

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN BELITUNG





BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu mengubah Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis...

Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan...

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);

12. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 14);

13. Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan...

3. Ketentuan Lampiran III Rencana Strategis Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran IV Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran V Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Lampiran VI Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Lampiran VII Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Lampiran VIII Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Lampiran IX Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Lampiran X Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang

merupakan...

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Lampiran XI Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan Lampiran XII Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Lampiran XIII Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan Lampiran XIV Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan Lampiran XV Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
16. Ketentuan Lampiran XVI Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
17. Ketentuan Lampiran XVII Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang

merupakan...

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

18. Ketentuan Lampiran XVIII Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
19. Ketentuan Lampiran XIX Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
20. Ketentuan Lampiran XX Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
21. Ketentuan Lampiran XXI Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
22. Ketentuan Lampiran XXII Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
23. Ketentuan Lampiran XXIII Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
24. Ketentuan Lampiran XXIV Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

25. Ketentuan...

25. Ketentuan Lampiran XXV Rencana Strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
26. Ketentuan Lampiran XXVI Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
27. Ketentuan Lampiran XXVII Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Tanjungpandan diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
28. Ketentuan Lampiran XXVIII Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Badau diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
29. Ketentuan Lampiran XXIX Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sijuk diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
30. Ketentuan Lampiran XXX Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Membalong diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
31. Ketentuan Lampiran XXXI Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Selat Nasik diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 25 Juli 2023

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 25 Juli 2023

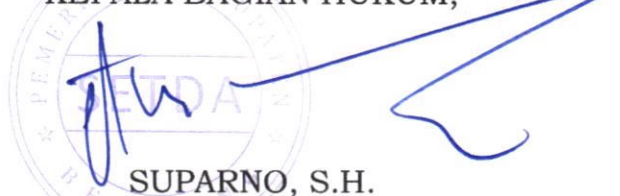
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUPARNO, S.H.

NIP. 19800315 200903 1 003



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan atas berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya, maka dapat diselesaikannya Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengoperasionalkan rencana program kegiatan pembangunan selama 3 (Tiga) Tahun yaitu Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Kepada Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung serta pihak-pihak yang terkait dalam proses penyusunan dokumen ini, Kami sampaikan apresiasi dan penghargaan serta ucapan terima kasih. Semoga apa yang diamanatkan dalam dokumen Renstra ini dapat mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Tanjungpandan, 2023

Kepala Dinas,

EDI USDIANTO, ST
NIP. 19750518 200112 1 004



DAFTAR ISI

	hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Dasar Hukum	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.2.1 Sumber Daya Manusia	16
2.2.2 Sumber Daya Aset/Modal	21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	34
2.5 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	39
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	39
3.2 Telaahan Tujuan Dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026	40
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	42
3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR)	42
3.3.2 Telaahan Renstra Dinas PUPRPRKP Provinsi	46
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	46
3.5 Isu Strategis	49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	50
4.1 Tujuan Dan Sasaran	50
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	50
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56



BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	59
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	87
BAB VIII	PENUTUP	88
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

	hal
Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2021 16
Tabel 2.2	Jumlah SDM berdasarkan Pangkat/Golongan 18
Tabel 2.3	Jumlah SDM Dinas PUPR Berdasarkan Pendidikan Terakhir 19
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai ASN DPUPR Tahun 2022 yang Telah Mengikuti Diklat .. 20
Tabel 2.5	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung Sampai dengan Tahun 2021 20
Tabel 2.6.a	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung 25
Tabel 2.6.b	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung 28
Tabel 2.7.a	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung 30
Tabel 2.7.b	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung 32
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Dinas PUPR 40
Tabel 3.2	Target Utama Kementerian PUPR sektor SDA, Binia Marga, Cipta Karya, dan Perumahan 43
Tabel 3.3	Sasaran Pembangunan PN 1 & PN 5 (Kementerian PUPR) dalam RPJMN 2020-2024 44
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PUPR 50
Tabel 4.2	Cascading Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 51
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 56
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 66
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Thun 2023 77



Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas PUPR yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	87
-----------	---	----



DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

	hal
Gambar 1.1 Hubungan Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen lain	3
Gambar 2.1 Struktur organisasi Dinas PUPR Kabupaten Belitung	9
Gambar 2.2 Komposisi Pegawai DPUPR	18
Gambar 2.3 Persentase SDM berdasarkan tingkat pendidikan	19



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat kabupaten, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan di tingkat perangkat daerah terdapat dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan sasaran strategis daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi perangkat daerah, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap perangkat daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan perangkat daerah, acuan dalam pembuatan rencana kerja, menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi, serta untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi.



Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kabupaten Belitung 2018-2023, hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung periode 2018-2023. Kabupaten Belitung sebagai salah satu daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan bahwa pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Hal tersebut selanjutnya diamanatkan untuk daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 untuk Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode tahun 2024-2026.

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 yang akan menjadi rujukan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten Belitung.

Rencana Strategis disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

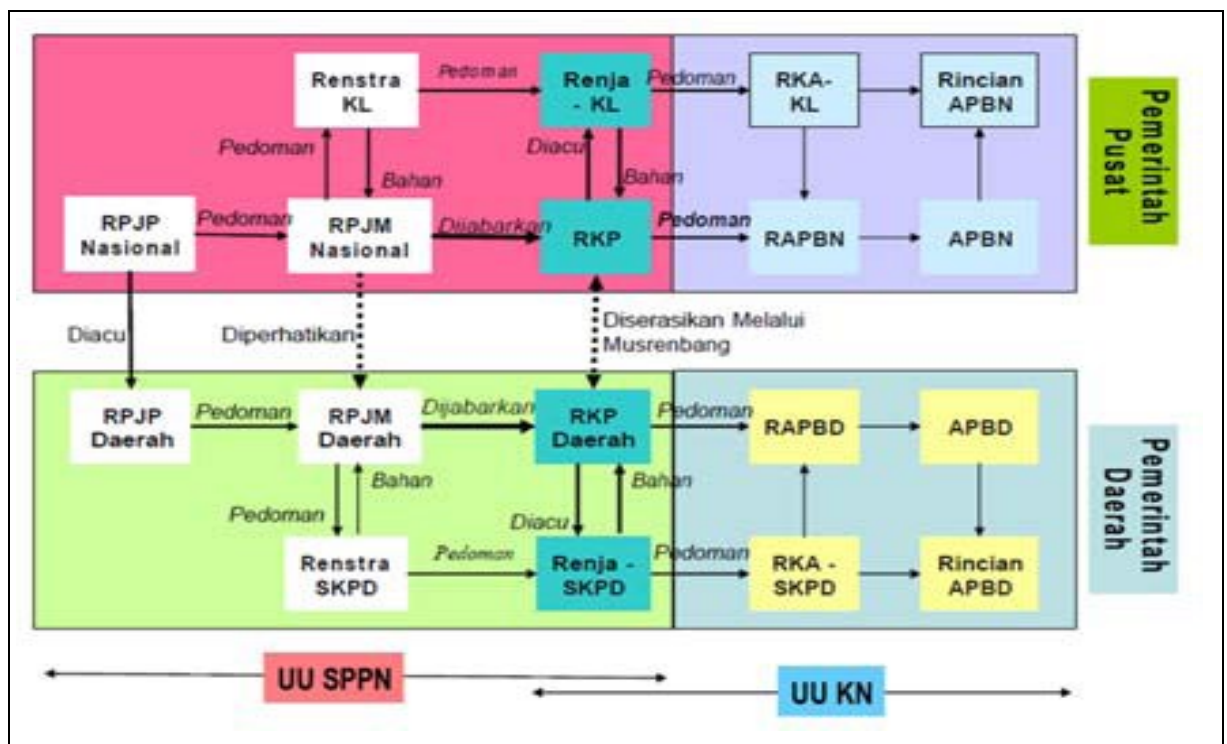
Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk guna melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Belitung melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 yang



berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) secara teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS), untuk mewujudkan Renstra sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah, maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah periode 2024-2026. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaahan terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) dan menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Hubungan antar dokumen Rencana Strategis (Renstra) dengan dokumen perencanaan lainnya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Hubungan Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen lain



Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah dirumuskan ke dalam rancangan kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD yang memuat Program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan atau landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara



- Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
 15. Peraturan Bupati Belitung Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan



- Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung;
16. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung 2024-2026 adalah memberikan arahan dan pedoman perangkat daerah serta seluruh aparatur dalam melaksanakan tugasnya dengan membangun komitmen bersama untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah secara berkesinambungan dan berkelanjutan dalam menentukan prioritas dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sehingga tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2024-2026 dapat tercapai.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung adalah:

- a. Menjadi pedoman strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengoperasionalkan rencana program kegiatan pembangunan selama 3 (Tiga) Tahun yaitu Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung;
- b. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas PUPR.
- c. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja layanan pelayanan perangkat daerah dan kelompok sasaran layanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat permasalahan pelayanan perangkat daerah, telaahan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah Tahun 2024-2026, telaahan renstra K/L dan renstra perangkat daerah provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah tahun 2014-2034 dan isu strategis.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah serta *cascading* kinerja perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung periode 2024- 2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

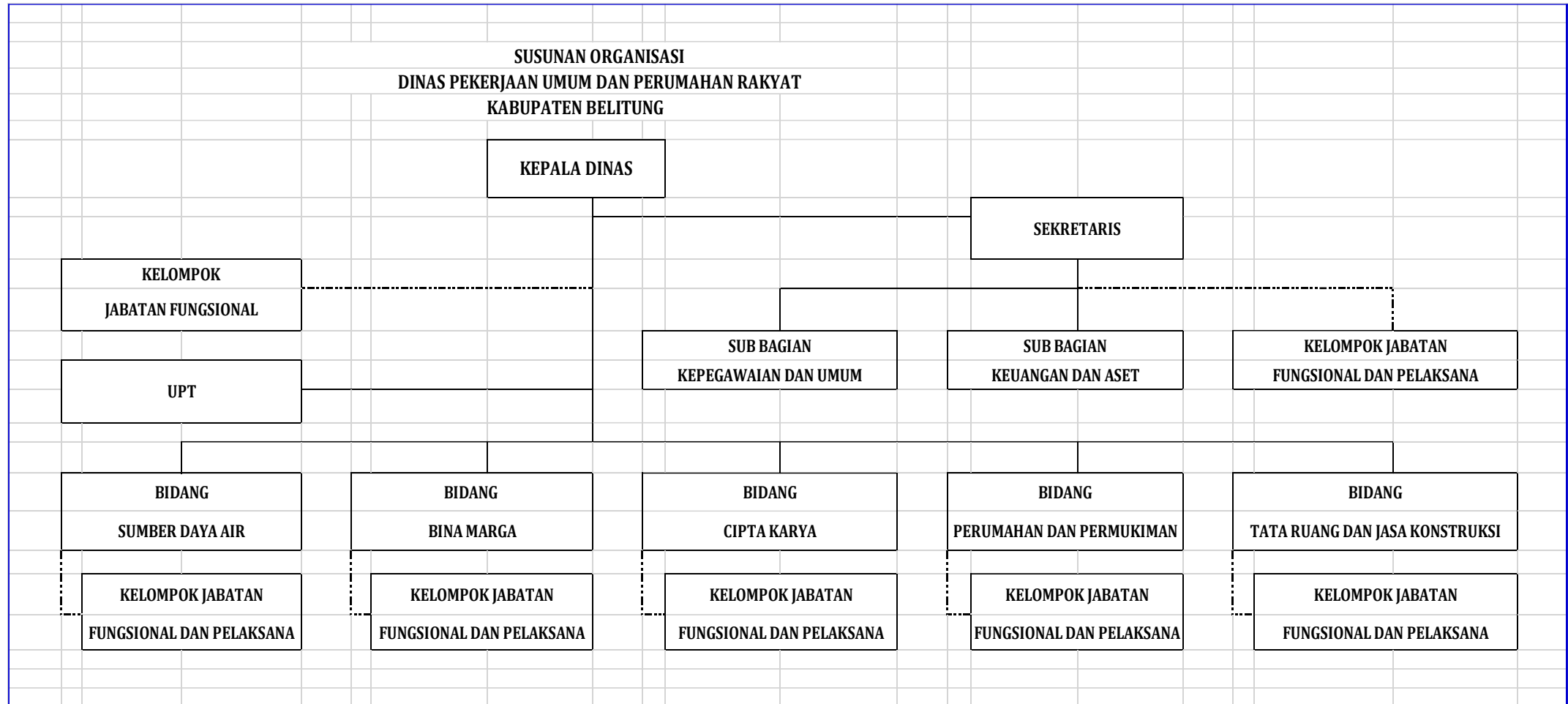
2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur organisasi Dinas PUPR Kabupaten Belitung





Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung sebagai berikut:

Susunan Organisasi Badan terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - 2.1. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2.3. Sub Koordinator Keuangan dan Aset
 - 2.4. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
3. Bidang Sumber Daya Air
4. Bidang Bina Marga
5. Bidang Cipta karya
6. Bidang Perumahan dan Permukiman
7. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi
8. UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan laboratorium
9. UPT Pengelolaan Air Minum
10. Kelompok jabatan Fungsional

1. Kepala Badan

Dinas PUPR dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundangundangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;



- c. koordinasi dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan urusan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, dan fasilitasi penyelenggaraan urusan perkantoran;
- f. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, serta sarana dan prasarana lingkungan kantor;
- g. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang sumber daya air.

Dalam melaksanakan tugas. Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan bidang sumber daya air;
- b. pelaksanaan pengembangan jaringan sumber daya air;
- c. pelaksanaan pengelolaan jaringan sumber daya air;
- d. penanggulangan bencana yang disebabkan oleh daya rusak air, yang meliputi bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi di bidang sumber daya air;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja bidang sumber daya air;
- g. pelaksanaan koordinasi urusan bidang sumber daya air dengan instansi teknis terkait;
- h. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



4. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang bina marga. Dalam melaksanakan tugas Bidang Bina Marga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan dibidang bina marga;
- b. pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan pemeliharaan dan preservasi jalan dan jembatan;
- d. penanggulangan tanggap darurat pasca bencana pada jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja bidang bina marga;
- g. penyusunan penerbitan izin, rekomendasi dan dispensasi pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan;
- h. pelaksanaan koordinasi urusan bidang bina marga dengan instansi teknis terkait;
- i. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Cipta karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang cipta karya. Dalam melaksanakan tugas Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan dibidang cipta karya;
- b. pelaksanaan pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan;
- c. pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung;



- e. penanggulangan tanggap darurat pasca bencana pada infrastruktur cipta karya;
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja bidang cipta karya;
- h. penyusunan penerbitan izin dan/atau rekomendasi bidang cipta karya;
- i. pelaksanaan koordinasi urusan bidang cipta karya dengan instansi teknis terkait;
- j. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perumahan dan Permukiman

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan permukiman. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan di bidang perumahan dan permukiman;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan pertamanan di daerah;
- e. penanggulangan tanggap darurat pasca bencana dengan penyediaan infrastruktur pada permukiman;
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja bidang perumahan dan permukiman;
- h. penyusunan penerbitan izin terkait penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- i. pelaksanaan koordinasi urusan bidang perumahan dan permukiman dengan instansi teknis terkait;



- j. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi

Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penataan ruang dan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan di bidang tata ruang dan jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan pengendalian tata ruang di daerah;
- c. pelaksanaan penataan kawasan dan pemanfaatan ruang di daerah;
- d. penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
- e. penanggulangan tanggap darurat pasca bencana terkait tata ruang dan jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja bidang tata ruang dan jasa konstruksi;
- h. pemberian izin dan/atau rekomendasi terkait tata ruang dan jasa konstruksi;
- i. pelaksanaan koordinasi urusan bidang tata ruang dan jasa konstruksi dengan instansi teknis terkait;
- j. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



8. Unit Pelaksana Teknis Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium

UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sarana dan prasarana perbekalan, dan laboratorium. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Unit Pelaksana Teknis Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium;
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana perbekalan, dan laboratorium di lingkup UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

9. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum (UPT PAM)

UPT PAM mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas di bidang Pengelolaan Air Minum yang berada di luar wilayah pelayanan PDAM Kabupaten Belitung, melakukan pemeliharaan dan melaksanakan pemungutan retribusi air minum dan air bersih yang didistribusikan kepada para pelanggan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud UPT PAM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPT PAM;
- b. Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan PAM beserta sarana prasarana pendukungnya;
- c. Pelaksanaan pemungutan retribusi air minum dan air bersih unit PAM yang didistribusikan kepada para pelanggan;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup UPT PAM;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.



10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kabupaten Belitung pada maret 2022, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 44 pegawai, yang terdiri dari 41 pegawai laki-laki (74.54%) dan 14 pegawai perempuan (25.45%). Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1/D4 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 45 orang (81.81%). Sisanya berupa lulusan SMP dan SMA sebanyak 10 orang (18.18%). Jumlah dan komposisi pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2022

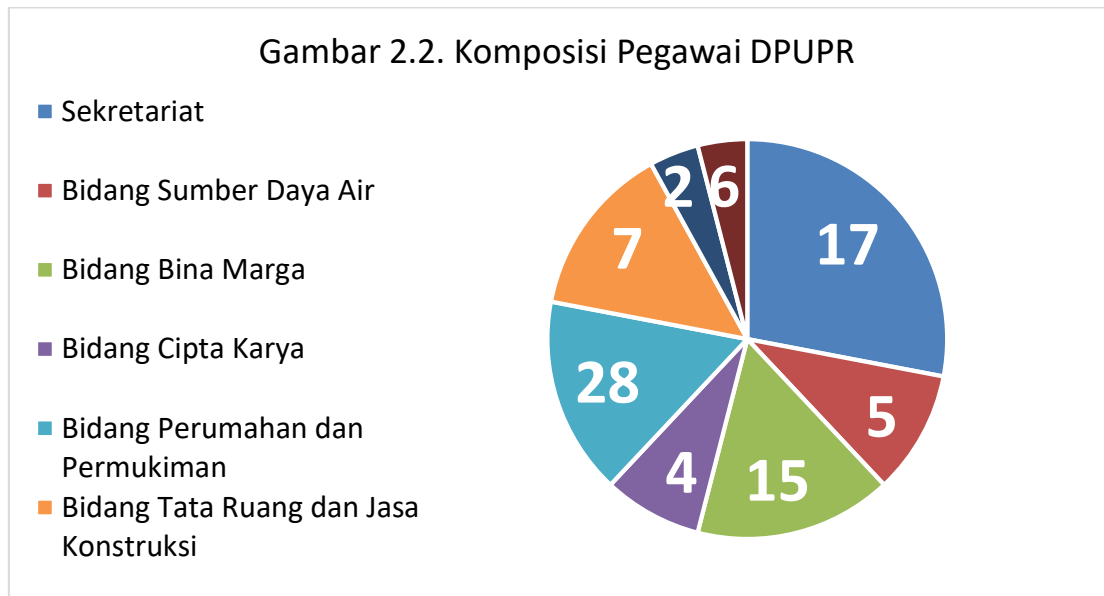
No	Unit Kerja	Jumlah		Ket
		Lk	Pr	
1	Kepala Dinas PUPR	1	-	
2	Sekretaris	1	-	
	1. Subbag Kepegawaian dan Umum	-	1	
	2. Subbag Keuangan dan Aset	-	1	
	3. Perencana Ahli Muda	-	1	
	4. Fungsional Pranata Komputer	1	-	
	5. Pengadministrasi Umum	1	-	
	6. Bendahara		6	
	6. Non ASN	3	1	
3	Kepala Sumber Daya Air	1	-	
	1. Tehnik Pengairan Muda	1	1	
	2. Analis Pengelolaan SDA	1	-	
	3. Pengelola SDA	-	1	



	4. Non ASN	1	-	
4	Kepala Bidang Bina Marga	-	-	
	1. Pengawas Jalan dan Jembatan	1	-	
	2. Pranata Pengelola Leger Jalan	1	1	
	3. Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan	1	-	
	4. Pengelola Pemeliharaan Jalan	1	-	
	5. Ahli Tehnik Jalan dan Jembatan Muda	2	-	
	6. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	1	-	
	7. Non ASN	3	6	
5	Kepala Bidang Cipta Karya	1	-	
	1. Tehnik Tata Bangunan dan Perumahan	1	-	
	2. Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	1	-	
	3. Pengawas Jaringan Utilitas	1	-	
	4. Non ASN	8	5	
6	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman	1		
	1. Tehnik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	3	-	
	2. Pengawas Bangunan dan Gedung	1	-	
	3. Pengelola Perumahan dan Permukiman	1	-	
	4. Analis Bangunan Gedung dan Permukiman	-	1	
	5. Calon Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan		1	
	6. Non ASN	20	4	
7	Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Kontruksi	-	-	
	1. Penata Ruang Ahli Muda	1	-	
	2. Analis Pemanfaatan Ruang	1	-	
	3. Analis Tata Ruang	-	1	
	4. Pengelola Tata Ruang	1	-	
	5. Pembina Jasa Konstruksi Muda	1		
	6. Fungsional Umum	1	-	
	7. Fungsional Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	1	-	
8	Kepala UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium	-	-	
	1. Penguji Laboratorium Tanah aspal dan Beton	1	-	



	2. Penguji Bahan dan Bangunan	1	-	
9	Kepala UPT Pengelolaan Air Minum	1	-	
	1. Kasubbag TU UPT PAM	1	-	
	2. Non ASN	22	2	
Jumlah		88	27	



Tabel 2.2. Jumlah SDM berdasarkan Pangkat/Golongan

Rincian	Jumlah PNS		Jumlah CPNS		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
Gol. IV	3	-	-	-	3
Gol. III	28	13	-	1	42
Gol. II	3	1	-	-	4
Gol. I	-	-	-	-	-

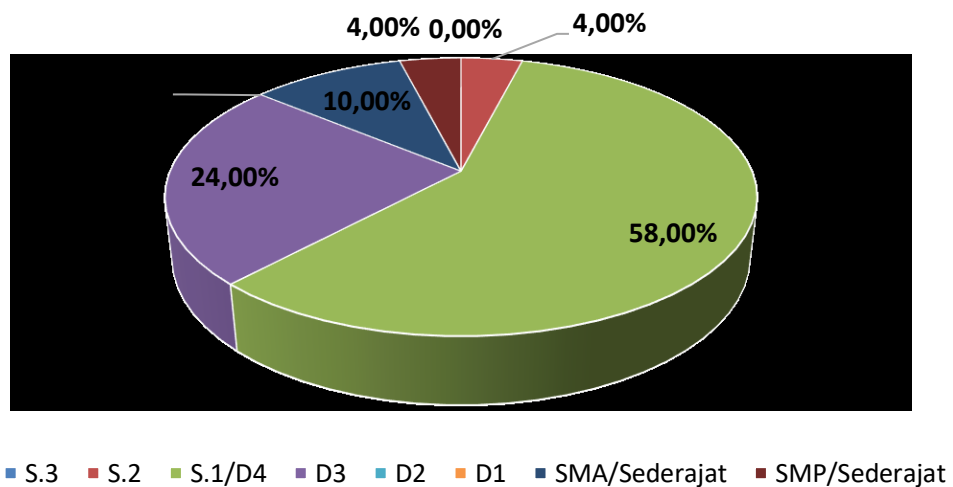
Kondisi kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini.



Tabel 2.3. Jumlah SDM Dinas PUPR Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Golongan PNS/CPNS	Pendidikan Terakhir																					
	S 3		S 2		S 1		D IV		D III		D II		D I		SMA		SMK		SMP			
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
PNS Gol. IV	-		1		2		-		-		-		-		-		-		-		-	
PNS Gol. III	-		-	1	12	7	5		8	1	-		-		3	1	-		-		-	
PNS Gol. II	-		-		-		-		2	1	-		-		-		-		-		1	-
PNS Gol. I	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
CPNS Gol. IV	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
CPNS Gol. III	-		-		-	1	-		-		-		-		-		-		-		-	
CPNS Gol. II	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
CPNS Gol. I	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Jumlah	-		1	1	17	8	5		10	2	-		-		3	1	-		-		1	-

Gambar 2.3. Persentase SDM berdasarkan tingkat pendidikan





Tabel 2.4 Jumlah Pegawai ASN DPUPR Tahun 2022 yang Telah Mengikuti Diklat

No	Jenis Diklat	Jumlah Pegawai		Yang telah mengikuti dan lulus	Yang belum mengikuti
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK. II	0	0	-	-
2	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	3	1	3	3
3	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	8	3	11	1
4	Diklat Fungsional	7	2	9	41
5	Diklat Barang dan Jasa	24	7	26	19

2.2.2. Sumber Daya Aset/Modal

Sarana dan Prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung merupakan salah satu penunjang utama guna meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung pada saat ini antara lain berupa:

Tabel 2.5 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung Sampai dengan Tahun 2022

NO	Jenis Barang	Satuan	Jumlah yang ada	Jumlah ideal	Kurang/ Cukup	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Berat	Ket.
	ALAT BESAR		4					4	
1	Macadan Roller/Three Wheel Roler		1					1	
2	Stamper		2					2	
3	Concrete Cutter		1					1	
	KOMPUTER		185						
1	Internet		1						
2	P.C Unit		64	71	31	40		24	
3	Lap Top		11	11	5	6			
4	Note Book		17			5			
5	Tablet PC		2	2	0	2			
6	Personal Komputer lainnya		1			1			
7	Hard Disk		5	10	10			5	
8	Storage Modul Disk (Peralatan Mini Komputer)		2					2	
9	CPU (Peralatan Personal Komputer)		2					2	
10	Monitor		11					11	
11	Printer (Peralatan Personal Komputer)		50	71	31	40		10	



12	Scanner (Peralatan Personal Komputer)		5	10	6	4	1		
13	Peralatan Personal Komputer lainnya		6					6	
14	Server		1	2	1	1			
15	Peralatan Komputer lainnya		7					7	
	ALAT KESELAMATAN KERJA		1						
1	Tenda		1					1	
	ALAT ANGKUTAN		45						
1	Station Wagon		1			1			
2	Sport Utility Vehicle (SUV)		1			1			
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)		1	6	5	1			
4	Truck + Attachment		1			1			
5	Pick Up		10	10	3	7	3		
6	Sepeda Motor		23			12	11		
7	Mobil Tangki Air		3	4	1	3			
8	alat angkutan darat bermotor lainnya (dst)		5	6	2	4	1		
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		35						
1	Mesin Gerinda		1					1	
2	Mesin Bor Tangan		1					1	
3	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)		1					1	
4	Gergaji Chain Saw		2					2	
5	peralatan las lainnya (dst)		3					3	
6	perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst)		1					1	
7	perkakas bengkel service lainnya (dst)		1					1	
8	perkakas standard (standard tools) lainnya (dst)		1					1	
9	Kunci Khusus Moment		3					3	
10	Rol Meter		2					2	
11	Global Positioning System		18			10		8	
12	Desicator (Size) 3		1					1	
	ALAT PERTANIAN		7						
1	alat pengolahan tanah dan tanaman lainnya (dst)		1			1			
2	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)		1			1			
3	alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya (dst)		3			3			
4	Lemari Penyimpan		2			2			
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		428						
1	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)		2					2	
2	Mesin Ketik Listrik		1					1	
3	Lemari Besi/Metal		5	10	5	5			
4	Lemari Kayu		7				2	5	
5	Filing Cabinet Besi		29	30	15	15	5	9	
6	Brandkas		3	5	5		3		
7	Lemari Kaca		11			7	4		
8	Alat Penghancur Kertas		8			6		2	
9	Mesin Absensi		1	1	0	1			
10	Alat Pengaman / Sinyal		18					18	
11	LCD Projector/Infocus		1	7	7		1		



12	Alat Kantor Lainnya		1					1	
13	Meja Kerja Besi/Metal		6			3	3		
14	Meja Kerja Kayu		18			10	2	6	
15	Kursi Besi/Metal		40	71	41	30	5	5	
16	Kursi Kayu		10			5	3	2	
17	Meja Rapat		7	9	2	7			
18	Meja 1/2 Biro		50	71	31	40	5	5	
19	Kursi Tamu		7	10	4	6	1		
20	Kursi Putar		27			20	2	5	
21	Sofa		4			4			
22	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner		1			1			
23	Mesin Pemetong Rumput		16			10	2	4	
24	Mesin Cuci		1					1	
25	Alat Pembersih lainnya		15					15	
26	Lemari Es		1	2	1	1			
27	A.C. Sentral		1			1			
28	A.C. Window		9			1		8	
29	A.C. Split		34	35	12	23		11	
30	Televisi		6			4		2	
31	Amplifier		1			1			
32	Loudspeaker		1			1			
33	Unit Power Supply		9			2		7	
34	Camera Video		45	45	35	10	5	30	
35	Tangga Aluminium		1				1		
36	Dispenser		4	11	9	2		2	
37	Mimbar/Podium		1					1	
38	Handy Cam		1					1	
39	Alat Rumah Tangga Lain-lain		21					21	
40	Alat Pemadam/Portable		1			1			
41	Lemari Buku Untuk Perpustakaan		1				1		
42	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis		2				2		
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		28						
1	Uninterruptible Power Supply (UPS)		7	71	71		2	5	
2	peralatan studio audio lainnya (dst)		3					3	
3	Camera Electronic		1				1		
4	Film Projector		1			1			
5	Layar Film/Projector		3			2		1	
6	Camera Digital		4					4	
7	Trestirial Camera		1					1	
8	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)		2			1	1		
9	Level		1			1			
10	Alat Studio Pemetaan lainnya		1			1			
11	Handy Talky (HT)		3				1	2	
12	Facsimile		1				1		
	ALAT LABORATORIUM		29						
1	Concrete Hammer Set		3			3			
2	alat laboratorium bahan bangunan konstruksi lainnya (dst)		2				2		
3	Cbr Lab. Set Cl.284		1			1			



4	alat laboratorium aspal, cat dan kimia lainnya (dst)		2			1	1		
5	Exstoder/Extruder		1				1		
6	Unconfined Air & Manometer		1				1		
7	Soil Test		2			1		1	
8	Balance (Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan)		1			1			
9	Alat Uji Tekan Hydrotastic		1				1		
10	Video Printer		2					1	
11	Sand Sample & Sand Container		1			1			
12	Distiling Apparatus		3			1	2		
13	Hand Penetrometer		1				1		
14	Meja Kerja		6			2		4	
15	Surface Rounghnes Measuring Device		1					1	
16	Automatic Dispenser		1					1	

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada dokumen Renstra Perubahan ketiga Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2019 – 2023 telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung sesuai fungsi pemerintahan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dapat dilihat dari tabel berikut:



Tabel 2.6.a. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Pencapaian Tahun Ke				
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN																			
1	Persentase layanan infrastruktur dasar permukiman yang layak				n/a	55,87%					51,93%								
2	Persentase pemenuhan infrastruktur wilayah				n/a	70,04%					68,39%								
INDIKATOR PROGRAM																			
1	Persentase peningkatan cakupan pelayanan air minum		√		77,00%					78,98%					102,57				
2	Persentase penduduk dengan akses air minum yang aman dan berkelanjutan		√			78,00%					80,48%					103,18			
3	Persentase Peningkatan cakupan pelayanan sanitasi		√		53,00%					53,88%					101,66				
4	Persentase jalan lingkungan yang tertangani					29,85%					15,87%					53,17			
5	Persentase drainase permukiman dalam kondisi baik					61,30%					66,75%					108,89			
6	Persentase pengolahan air limbah permukiman		√			54,00%					53,88%					99,78			
7	Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Permukiman				100,00%					100,00%					100				
8	Persentase Luasan Permukiman Kumuh		√		24,91%	15,39%				16,76%	6,78%				132,72	155,92			
9	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Mendapat Rumah Layak Huni		√			100,00%					100,00%					100			
10	Terpenuhinya Kebutuhan Prioritas Bangunan/Gedung Negara				100,00%					100,00%					100				
11	Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar				11,90%	17,40%				11,95%	13,06%				100,42	75,06			
12	Persentase Tertatanya Bangunan dan Lingkungan				10,00%	15,00%				10,00%	10,00%				100	66,67			
13	Terpenuhinya Kebutuhan Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Negara				100,00%	100,00%				100,00%	100,00%				100	100			



14	Persentase Taman Terkelola				100,00%	100,00%				100,00%	100,00%				100	100			
15	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Terampil dan Teknisi Konstruksi Sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)				100,00%					100,00%					100				
16	Persentase Tenaga Terampil Bersertifikat Kontruksi					53,00%					76,13%					143,64			
17	Persentase Jalan Kabupaten yang Memenuhi Standar				41,00%					38,78%					94,59				
18	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik		√		76,00%	76,00%				76,00%	88,09%				100	115,91			
19	Panjang Jalan yang mendapat Pemeliharaan				480.00 Km					523.98 Km									
20	Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan				100,00%					100,00%					100				
21	Panjang Jembatan yang mendapat Pemeliharaan				100.00 M					22.00 M									
22	Persentase Sawah Terairi Irigasi		√		54,26%	54,72%				52,10%	54,02%				96,02	98,72			
23	Persentase Panjang Turap/Talud/Bronjong yang ditangani				6,52%	26,50%				7,18%	10,07%				110,12	38			
24	Persentase Drainase Sekunder dalam Kondisi Baik				46,85%	59,35%				50,57%	62,22%				107,94	104,84			
25	Persentase Sumber Air Baku yang Terkelola dengan baik					12,00%					11,76%					98			
26	Dokumen Tata Ruang				2 Dok	3 dok				2 Dok	0				100	-			
27	Dokumen Tata Ruang yang Telah diperdakan					1 dok					0				-	-			
28	Terkendalnya Pemanfaatan Ruang				100,00%					100,00%					100				
29	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang		√		100,00%	100,00%				100,00%	100,00%				100	100			
30	Ketaatan Terhadap RTRW				100,00%	100,00%				100,00%	97,60%				100	97,6			
31	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran				100,00%	100,00%				100,00%	100,00%				100	100			
32	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur				100,00%	100,00%				100,00%	100,00%				100	100			
33	Meningkatnya Disiplin Aparatur				100,00%	100,00%				100,00%	100,00%				100	100			
34	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Menigkat Kompetensinya Sesuai Bidangny				100,00%					100,00%					100				



35	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Meningkatkan Kompetensinya Sesuai Perencanaan				100,00%					100,00%					100			
36	Persentase Ketersediaan Laporan Progresif Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel				100,00%					100,00%				100				
37	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%					100,00%				100				
38	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum				100,00%					100,00%				100				



Tabel 2.6.b. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Pencapaian Tahun Ke				
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
I	Indikator Tujuan dan Sasaran																		
1	Persentase layanan infrastruktur dasar permukiman yang layak		√				53,54%	55,36%	56,97%			55,57%	58,64%				103,79	105,92	
2	Rasio permukiman layak huni		√				99,65%	99,75%	100,00%			99,73%	99,79%				100,08	100,04	
3	Persentase pemenuhan infrastruktur wilayah		√				70,55%	70,79%	71,08%			69,23%	65,74%				98,13	92,87	
4	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)						75,00	75,00	75,00			77,50	79,22%				103,33	105,63	
II	Indikator Program																		
1	Persentase penduduk dengan akses air minum yang aman dan berkelanjutan		√				81,00%					81,85%					101,05		
2	Persentase penduduk dengan akses air minum yang layak		√					82,09%	83,16%				82,78%					100,84	
3	Persentase pengolahan air limbah permukiman						53,98%	54,14%	54,30%			54,04%	54,79%				100,11	101,20	
4	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik						15,50%	18,83%	22,15%			15,83%	20,02%				102,13	106,32	
5	Persentase jalan lingkungan yang tertangani		√				18,59%					22,64%					121,79		
6	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar						14,46%	15,86%	17,26%			14,25%	14,82%				98,55	93,44	
7	Persentase Tertatanya Bangunan dan Lingkungan		√				12,50%	15,00%	17,50%			n/a	15,00%					100,00	
8	Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten		√				60,00%	60,00%	60,00%			70,00%	90,00%				116,67	150,00	
9	Jumlah warga negara korban bencana yang mendapat rumah layak huni						100,00%					-					0,00		
10	Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana							67,00%	100,00%				0,00					0,00	
11	Persentase Luasan kawasan kumuh						85,77%					52,60%					61,33		
12	Persentase pengurangan Luasan kawasan kumuh							80,77%	0,00%				33,45%					41,41	



13	Persentase Penanganan dan pencegahan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh					99,32%	99,51%	99,80%				99,66%				100,15
14	Persentase taman terkelola					100,00%					100,00%				100,00	
15	persentase PSU yang dikelola						53,60%	66,29%				44,90%				83,77
16	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik					76,00%										
17	Persentase jalan mantap kabupaten					72,32%	72,55%	72,78%			70,88%	66,95%			98,01	92,28
18	Persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik					36,61%	41,54%	45,10%			40,57%	43,03%			110,82	103,59
19	Persentase penyelenggaraan penataan ruang		√			100,00%	100,00%	100,00%			98,03%	98,24%			98,03	98,24
20	1. Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan					100,00%	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%			100,00	100,00
	2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah					75,00	75,00	75,00			77,50%				1,03	
	3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah					100,00%	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%			100,00	100,00
	4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur					100,00%	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%			100,00	100,00



Tabel 2.7.a Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung

No	Uraian		Anggaran Tahun 2019-2020*					Realisasi Anggaran Tahun 2019-2020**					Rasio antara realiasi dan anggaran ***					Rata-rata Pertumbuhan ****	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Anggaran	Realisasi
1	Program	Pembinaan dan Pengembangan Air Minum	8.731,73					8.178,26					93,66						
2	Program	Penyediaan dan Pengelolaan Air minum		10.190,64					6.108,96					59,95					
3	Program	Pembinaan dan Pengembangan Kesehatan Lingkungan Permukiman	1.554,04					1.517,21					97,63						
4	Program	Pengembangan Infrastruktur Permukiman		5.593,50					5.458,82					97,59					
		-Persentase Jalan Lingkungan yang Tertangani		3.940,50					3.889,63					98,71					
		-Persentase Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik		1.623,00					1.569,19					96,68					
		-Persentase Pengolahan Air Limbah Permukiman		30					-					-					
5	Program	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	17.538,50					15.264,61					87,03						
6	Program	Penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh		4.295,11					4.046,99					94,22					
7	Program	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Korban Bencana	-	-				-	-				-	-					
8	Program	Pembinaan dan Pengembangan Penataan Bangunan	5.478,08					5.013,78					91,52						
9	Program	Pengembangan dan Penataan Bangunan		2.538,12					2.431,02					95,78					
		-Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar		688,12					585,08					85,03					
		-Terpenuhinya Kebutuhan Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Negara		1.600,00					1.597,26					99,83					
		-Persentase Tertatanya Bangunan dan Lingkungan		250					248,68					99,47					
10	Program	Pengembangan dan Penataan Taman	3.292,74	1.859,89				3.184,88	1.783,72				96,72	95,9					
11	Program	Pembinaan dan Pengembangan Jasa Kontruksi	236	5				199,39	4,9				84,49	97,94					
12	Program	Pengembangan Jalan dan Jembatan	60.751,36					60.238,30					99,16						



13	Program	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		64.617,72				63.392,64					98,1				
14	Program	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	42.050,90				41.812,64					99,43					
15	Program	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	1.295,20				1.201,99					92,8					
16	Program	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	5.027,43	4.519,24			4.826,83	4.210,63				96,01	93,17				
17	Program	Peningkatan dan Pengembangan Turap/Talud/Bronjong	1.877,44	675			1.869,57	673,05				99,58	99,71				
18	Program	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Drainase Sekunder	5.851,38	2.505,00			5.827,34	2.496,19				99,59	99,65				
19	Program	Pengelolaan Sumber Air Baku		125				124,61					99,68				
20	Program	Perencanaan Tata Ruang	648,62	37,88			621,56	35				95,83	92,41				
		-Dokumen Tata Ruang		-				-									
		-Dokumen Tata Ruang yang Diperdakan		37,88				35					92,41				
21	Program	Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	330,66	72,25			248,94	51,73				75,28	71,6				
		-Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang		37,25				32,56					87,4				
		-Ketaatan Terhadap RTRW		35				19,18					54,79				
22	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.395,20	1.022,18			1.250,27	753,42				89,61	73,71				
23	Program	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.266,54	533,55			1.149,82	404,99				90,78	75,9				
24	Program	Peningkatan Disiplin Aparatur	28	19,6			27,97	19,56				99,88	99,79				



Tabel 2.7.b Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung

No	Uraian		Anggaran Tahun 2021-2023*					Realisasi Anggaran Tahun 2021-2023**					Rasio antara realiasi dan anggaran ***					Rata-rata Pertumbuhan ****	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Anggaran	Realisasi
1	Program	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			6.586,73	5.983,96			5.636,11	5.775,13					85,57	94,92			
2	Program	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			1.703,70	4.285,07			1.703,20	4.272,50					99,97	99,71			
3	Program	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase			799,32	840,00			790,44	1.037,32					98,89	99,74			
4	Program	Pengembangan Permukiman			5.598,18				5.087,75						90,88				
5	Program	Penataan Bangunan Gedung			6.032,50	2.585,00			5.351,39	2.906,93					88,71	88,49			
6	Program	Penataan Bangunan dan Lingkungannya				312,00				306,04						98,09			
7	Program	Pengembangan Jasa Kontruksi			165,64	181,07			97,78	124,31					59,03	68,85			
8	Program	Pengembangan Perumahan			130,00	254,50			-	99,81					0,00	39,22			
9	Program	Kawasan Permukiman			2.181,24	303,55			1.902,53	241,12					87,22	74,52			
10	Program	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh				1.563,40				1.562,40						99,94			
11	Program	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			1.768,18	7.336,79			1.704,17	1.562,40					96,38	96,97			
12	Program	Penyelenggaraan Jalan			75.188,79	78.206,95			67.755,43	70.140,54					90,11	85,55			
13	Program	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			5.981,13	4.485,20			5.644,90	4.767,65					94,38	99,63			
14	Program	Penyelenggaraan Penataan Ruang			1.655,14	1.802,60			1.308,42	1.283,95					79,05	75,91			
15	Program	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			8.815,33	9.641,22			8.223,66	9.153,63					93,29	92,91			



Dari penjelasan Tabel 2.6 di atas pernyataan kinerja Tahun 2022 dan realisasi kinerja pada Tahun 2022, pencapaian yang didapatkan antara target dan realisasi adalah sebagai berikut:

- Pencapaian indikator persentase layanan infrastruktur dasar permukiman yang layak Tahun 2022 yaitu 58,64% dari target yang ditetapkan sebesar 55,36% sedangkan pada tahun 2021 pencapaian sebesar 55,57% dari target sebesar 53,54%. Terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 2,13% dari tahun 2021. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor yaitu peningkatan capaian kinerja air limbah sebesar 0,75% dari tahun 2021, menyusul peningkatan capaian kinerja persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik sebesar 4,19%.
- Pencapaian indikator Persentase pemenuhan infrastruktur wilayah Tahun 2022 yaitu 65,74% dari target yang ditetapkan sebesar 70,79% sedangkan pada tahun 2021 pencapaian sebesar 69,23% dari target sebesar 70,55%. Terjadi penurunan capaian kinerja sebesar 5,26% dari tahun 2021. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor yaitu penurunan capaian kinerja persentase jalan mantap kabupaten sebesar 5,73 poin dari tahun 2021.

Kinerja Jika dilihat berdasarkan tabel 2.7.b, Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang memiliki persentase realisasi anggaran tertinggi (99,97%) disusul oleh Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (99,94%) serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (99,74%) dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (99,71%). Adapun Program Pengembangan Perumahan memiliki presentase realisasi anggaran terendah pada tahun 2022 (0%). Kegiatan pembangunan rumah bagi korban bencana, yang merupakan satu-satunya kegiatan dalam program pengembangan perumahan, tidak terlaksana dikarenakan tidak ada bencana skala besar yang terjadi di kabupaten Belitung sepanjang tahun 2022. Adapun realisasi kinerja dan anggaran secara menyeluruh sebesar 88,39%, menurun dari tahun 2021 yang sebesar 90,22%. Terdapat beberapa faktor pendorong keberhasilan dan faktor penghambat dari capaian realisasi anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung sebagai berikut:

Faktor Pendorong Keberhasilan:

1. Pelaksanaan Kegiatan Melalui LPSE baik untuk pengadaan konstruksi, jasa konsultansi, maupun pengadaan barang, sehingga baik yang melalui proses pelelangan umum maupun pengadaan langsung dapat menjangkau daerah yang lebih luas dan tekendalinya waktu pengadaan.



2. Harga kontrak yang lebih rendah dari pagu anggaran menyebabkan terjadinya efisiensi anggaran.
3. Sistem pelaporan online melalui aplikasi (SIPK, TEPRA, SIMDA) membantu proses pengendalian anggaran.

Adapun faktor penghambat keberhasilan adalah:

Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung yang kurang maksimal. Jumlah SDM dengan jumlah program dan kegiatan tidak berbanding lurus sehingga satu orang harus mengerjakan beberapa pekerjaan dengan tanggung jawab diluar tugas dan fungsinya. Jumlah seluruh sumber daya manusia (ASN) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung tahun 2022 adalah 49 orang sedangkan jumlah seluruh paket kegiatan sebanyak 243 Paket. Jumlah ini membuat setiap orang yang harus menanggung beban sebanyak 12,15 paket kegiatan. Kegiatan ini belum termasuk tugas pokok yang harus dikerjakan oleh ASN sehari-hari. Paket kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagian besar merupakan pengadaan jasa konstruksi dengan beban kerja yang cukup berat. Dibutuhkan skill/kemampuan sebagai pemimpin dalam manajemen proyek/konstruksi karena dalam pelaksanaan setiap jasa konstruksi memerlukan seorang Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan yang berlaku. Di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, setiap kepala bidang bertugas sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), artinya yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen/pimpinan proyek suatu kegiatan jasa konstruksi adalah tiap-tiap kepala seksi yang sekarang menjadi fungsional dan staf/pelaksana. Dengan jumlah staf atau pelaksana yang hanya beberapa orang saja, jika tidak diiringi dengan kemampuan yang handal dalam manajemen kegiatan, maka setiap paket kegiatan yang ada di bidang tidak akan dapat selesai secara maksimal.

2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung yang tercantum dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang



Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, maka Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung memberikan pelayanan kepada kelompok sasaran yaitu Masyarakat, Kejaksaan Negeri Belitung, Polres Belitung, Dandim Belitung, PDAM Kabupaten Belitung, Dinas Pariwisata, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perindustrian, Dinas Perhubungan serta Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan adalah sebagai berikut:

Tantangan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air:

1. Mengoptimalkan potensi sumber air baku permukaan seperti ex kolong tambang timah yang tersebar di setiap kecamatan yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air baku domestik (keperluan rumah tangga), industri dan irigasi.
2. Bagaimana melindungi sumber air baku permukaan ini dari peruntukan ruang yang dapat mengurangi daya dukung lingkungan sekitarnya.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi dari mulai perencanaan, pelaksanaan, serta operasi dan pemeliharaan
4. Membentuk komisi irigasi, P3A (perkumpulan petani pemakai air) di Kabupaten Belitung/Pemerintah daerah.
5. Mengoptimalkan pengelolaan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai kewenangan kabupaten.
6. Membangun kolam retensi/pintu pengendali air pada kawasan yang berpotensi banjir di wilayah perkotaan.



Tantangan Pembangunan Bidang Bina Marga:

1. Memperdayakan SDM secara Optimal dalam Pencapaian Kinerja KeBinaMargaan
2. Mengoptimalkan proses Penyusunan Dokumen Perencanaan
3. Mengoptimalkan Aplikasi Perencanaan baik di tingkat perencanaan pusat (KRISNA) maupun daerah (SIPD)
4. Mengoptimalkan Koordinasi antara Fungsi perencanaan dan Penganggaran
5. Mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pengembangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Peluang Pembangunan Bidang Bina Marga:

1. Adanya Undang-undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
2. Adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan dan Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
3. SDM yang memiliki Kompetensi
4. Tersedianya Tenaga Fungsional tertentu

Tantangan Pembangunan Bidang Cipta Karya, meliputi:

1. Memberdayakan SDM aparatur secara optimal pencapaian kinerja Bidang Cipta Karya.
2. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi yang berbasis teknologi dalam membantu perencanaan dan penyusunan data base Bidang Cipta Karya.
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Pemenuhan kebutuhan air minum dan Penyediaan pelayanan pengelolaan Pengelolaan Limbah domestik.
4. Tindak lanjut terhadap Audit BPK tahun 2022 dibidang penyelenggaraan ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan aman.
5. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan Provinsi dan Kementerian PUPR dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan kegiatan idang Cipta Karya di Kabupaten Belitung.

Peluang Pembangunan Bidang Cipta Karya:

1. Mendukung Program Inovatif Kabupaten Belitung yaitu Program Air Bersih Untuk Masyarakat (PUKAT).



2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung yang menekankan tentang keandalan bangunan gedung.

Tantangan Pembangunan Bidang Perumahan Permukiman, meliputi:

1. Belum adanya konsep perencanaan pengembangan perumahan dan permukiman daerah yang terintegrasi.
2. Masih kurangnya ketersediaan ruang terbuka hijau perkotaan/taman kota/taman publik.
3. Belum tersedianya data inventarisasi PSU skala lingkungan.
4. Belum optimalnya penyerahan PSU perumahan MBR.
5. Belum tercapainya 0% kawasan kumuh.
6. belum adanya sk bupati terkait adanya bencana di lokasi rawan bencana.

Peluang Pembangunan Bidang Perumahan Permukiman, meliputi:

1. Adanya UU nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk penyediaan taman perkotaan.
3. kewenangan penanganan rumah akibat bencana menjadi SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten.

Tantangan Pembangunan Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi, meliputi:

Tantangan Seksi Tata Ruang:

1. Melengkapi peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan.
2. Mendorong efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur yang sesuai Rencana Tata Ruang.
4. Meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat (termasuk perempuan) dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Tantangan pembangunan Seksi Jasa Konstruksi meliputi:

1. Transformasi pengelolaan layanan jasa konstruksi secara digital.
2. Meningkatkan ketersediaan tenaga konstruksi bersertifikat.
3. Pengawasan terhadap kualitas perusahaan penyedia konstruksi serta mutu bangunan.



Tantangan Sekretariat Dinas meliputi:

1. Pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung perubahan peran ke depan yang diharapkan berubah dari yang semula lebih dominan sebagai operator-regulator menjadi dominan regulator-fasilitator.
2. Penyelenggaraan *good governance* yang efektif untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.
3. Peningkatan peran koordinasi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman antar tingkatan pemerintahan (Pusat, Provinsi, Kabupaten dan OPD) dan antar pelaku pembangunan.

Peluang Sekretariat Dinas meliputi:

1. Tersedianya tenaga fungsional tertentu dan fungsional lainnya.
2. Program yang dilaksanakan oleh bidang Sekretariat merupakan program rutin yang memiliki standar SOP yang jelas.
3. Adanya transformasi digital yang memudahkan koordinasi antar tingkatan (sekretariat-bidang internal OPD, sekretariat-sekretariat OPD lainnya).



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung berdasarkan Peraturan Bupati Belitung nomor 77 tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dalam memberikan pelayanan senantiasa mampu menyesuaikan dengan lingkungan internal maupun eksternal dan aspiratif bagi pengguna layanan. Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang dihadapi dapat ditinjau dari dua urusan, yaitu fungsi penunjang urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Adapun permasalahan inti sebagai berikut:

1. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi seperti infrastruktur jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan baik kegiatan bidang pertanian, perikanan dan pariwisata. Kabupaten Belitung dengan potensi pariwisata yang mendunia merupakan salah satu destinasi prioritas (DPP). Dalam wilayah Kabupaten Belitung terdapat KSPN Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Kelayang, dan Belitong UNESCO Global Geopark. Untuk mendukung kegiatan pariwisata dibutuhkan konektifitas antar destinasi wisata yang melingkupi seluruh wilayah kabupaten serta aksesibilitas kedalam destinasi wisata itu sendiri. Selain daripada itu untuk mendukung kegiatan pariwisata dibutuhkan infrastruktur air bersih dan sanitasi. Ketersediaan berbagai infrastruktur pendukung pariwisata memerlukan ketersediaan lahan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan peruntukan ruang.
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana permukiman yang layak huni. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan peningkatan kebutuhan akan perumahan terutama dikawasan perkotaan.



Tingginya kebutuhan akan lahan untuk perumahan mengurangi penyediaan ruang terbuka hijau sebagai daerah serapan air. Pembangunan perumahan swadaya yang tanpa perencanaan dan pengelolaan kawasan dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan ketidakteraturan bangunan. Kemiskinan penduduk menyebabkan sulitnya mendapat rumah yang layak sehingga masyarakat hanya dapat menghuni rumah yang tidak layak. Faktor-faktor ini mendorong timbulnya kawasan kumuh di area perkotaan.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Dinas PUPR

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Ketersediaan dan layanan infrastruktur wilayah yang belum optimal	Belum optimalnya infrastruktur kePUan	Pengelolaan sumber daya air belum optimal
			Belum terpenuhinya Standar pelayanan minimal air minum dan sanitasi
			Belum optimalnya pelayanan Jalan kabupaten
			Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang
			Belum optimalnya penyelenggaraan bangunan gedung
			Belum optimalnya pembinaan jasa konstruksi dan mutu konstruksi
		Belum optimalnya infrastruktur permukiman	Belum optimalnya sarana dan prasarana umum permukiman
			Berkembangnya kawasan kumuh perkotaan

3.2. TELAAHAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Belitung periode 2018-2023. Kabupaten Belitung salah satu daerah yang akan melaksanakan pemilu kepala daerah serentak di Tahun 2024, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1



Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Sehingga di Tahun 2023 akan ada kekosongan pimpinan kepala daerah di Kabupaten Belitung.

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD yang akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka disusunlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Dinas PUPR Kabupaten Belitung sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan dalam mencapai tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026 dengan mengacu pada tujuan RPD yaitu **“Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi”** dengan **Sasaran** adalah “Meningkatnya infrastruktur kewilayahan“ yang terdiri dari 2 Strategi yaitu **strategi kesatu** “Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah”, dengan **6 (enam) arah kebijakan** yaitu: meningkatkan kebijakan perencanaan tata ruang, Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang, peningkatan standar jalan kabupaten, peningkatan jalan non status menjadi jalan kabupaten, Meningkatkan legalitas dan pengelolaan sumber daya air, dan meningkatkan pengendalian sumber daya air. **Strategi kedua** “Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Layak huni”, dan dengan **8 (delapan) arah kebijakan** yaitu: Pemenuhan rumah layak huni korban bencana, Pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah, Rehabilitasi rumah layak huni untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), Meningkatkan aksesibilitas lingkungan dan permukiman; Pengurangan kawasan kumuh; meningkatkan pelayanan air minum/air bersih; Meningkatkan sarana dan prasarana air limbah; dan Meningkatkan sarana dan prasarana drainase lingkungan.

Terdapat faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung 2024-2026 yaitu:

a. Faktor penghambat

- Masyarakat yang tinggal di permukiman rawan bencana masih enggan untuk pindah dari lokasi existing



- Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air
- Belum optimalnya penyelenggaraan jalan kabupaten
- Belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang daerah
- Belum optimalnya kinerja air minum dan sanitasi
- Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana umum perumahan dan permukiman
- Ketersediaan rumah layak huni bagi MBR masih bergantung pada jumlah anggaran yang tersedia untuk perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung
- Belum ada Perbup tentang *database* rumah tidak layak huni di daerah yang rawan bencana atau lokasi kumuh

b. Faktor pendorong

- Terdapat banyak potensi sumber air baku di kabupaten Belitung;
- Tersedianya dana dukungan dari pemerintah pusat melalui DAK untuk pembangunan jalan di kabupaten
- Adanya Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD)
- Bantuan Penyediaan SPAM dari pemerintah pusat
- Tersedianya dana dukungan dari pemerintah pusat melalui DAK untuk pembangunan sarana pengolahan limbah domestik
- Telah dibuat *database* rumah tidak layak huni di tempat rawan bencana;
- Adanya program pemerintah pusat dan provinsi untuk pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni;

3.3. TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, berikut merupakan target pembangunan infrastruktur utama kementerian PUPR di bidang sumber daya air, konektivitas, keciptakarya, dan perumahan



Tabel 3.2 Target Utama Kementerian PUPR sektor SDA, Binia Marga, Cipta Karya, dan Perumahan

SUMBER DAYA AIR	KONEKTIVITAS	PERMUKIMAN	PERUMAHAN
58.5 m³ /kapita/tahun	2.500 Km	100%	51.340 Unit
Peningkatan Kapasitas Daya Tampung	Pembangunan Jalan Tol	Akses Air Minum Layak <i>30% Jaringan Perpipaan</i>	Rumah Susun
61 Unit	3.000 Km	90%	10.000 Unit
Bendungan	Pembangunan Jalan Baru	Akses Sanitasi Layak <i>15% Termasuk Aman</i>	Rumah Khusus
500 Unit	38.328 m	10.000 Ha	813.660 Unit
Pembangunan Embung	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Permukiman Kumuh	Rumah Swadaya
500.000 Ha	31.053 m	100%	262.345 Unit
Pembangunan Daerah irigasi	Pembangunan Fly Over/Underpass	Hunian Dengan Akses Sampah Terkelola Baik di Perkotaan	PSU Perumahan
2.000.000 Ha		5.555 Unit	
Rehabilitasi Jaringan Irigasi		Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan Olahraga dan Pasar	
50 m³ /detik			
Ketersediaan Air Baku			
2.100 Km			
Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai			

Sesuai dengan arahan RPJMN 2020-2024, pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan. Sasaran yang dicapai dalam waktu 5 tahun mendatang oleh Kementerian PUPR dalam mendukung pencapaian pembangunan infrastruktur nasional adalah:



Tabel 3.3 Sasaran Pembangunan PN 1 & PN 5 (Kementerian PUPR) dalam RPJMN 2020-2024

PN	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Target 2024
1	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi		
	1. Peningkatan presentase irigasi premium (%)	12,3	16,4
	2. Pembangunan jaringan irigasi baru (Ha)	1.000.000	500.000
	3. Peningkatan ketersediaan air baku domestik dan industri (m ³ /detik)	81,4	131,4
	4. Pembangunan Bangunan Multiguna (Kumulatif) (Unit)	45	61
5	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar		
	1. Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	54.1 (2018)	70
	2. Rasio KPR terhadap PDB (%)	2.9 (2017)	4%
	3. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman (%)	87.8 layak termasuk 6.7 aman (2018)	100 layak dan 15 aman
	4. Rumah Tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	20 (2018)	30
	5. Ruah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%)	74.6 layak termasuk 7.42 aman (2018)	90 layak termasuk 15 aman
	1. Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman/kota/regional (Rumah Tangga)	1.3 Juta (2015-2019)	3 Juta
	2. Jumlah rumah tangga yang terlayani instalasi pengolahan lumpur tinja (Rumah Tangga)	N/A	6.5 Juta
	3. Rumah tangga yang masih mempraktikkan buang aik besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (%)	9.36 (2018)	0
	4. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik do perkotaan (%)	59.45 penanganan dan 1.19 pengurangan (2016)	80 penanganan dan 20 pengurangan
	1. Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar metode lahan urug sanitasi (Rumah Tangga)	N/A	19 Juta
	2. Pembangunan jaringan irigasi baru (kumulatif) Ha)	1 Juta	500 Ribu
	3. penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)	53	65
	4. Peningkatan ketersediaan air baku domestic dan industri (m ³ /detik)	81,36	131,36



	5. Pembangunan bendungan multiguna (unit)	45	63
	6. Peningkatan produktivitas pemakaian air untuk produksi padi (m ³ /kg)	N/A	3
	7. Penurunan resiko bencana dengan risiko bencana tinggi (provinsi)	N/A	20
5	Meningkatnya konektivitas wilayah		
	1. Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 Km)	2,3	1,9
	2. Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi (Km)	1,461	2,500
	3. Panjang jalan baru yang terbangun (Km)	3,387	3,000
	4. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten-kota (%)	92/68/57	97/75/65

Berdasarkan sasaran strategis Renstra Kementerian PPN/Bappenas diatas, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung adalah:

Faktor Penghambat:

Adapun faktor penghambat terhadap pelayanan pada Dinas PUPR Kabupaten Belitung terhadap sasaran yang ingin dicapai oleh Kementrian PUPR, yaitu:

1. Potensi sumber air baku belum dimanfaatkan
2. Keterbatasan sumber air baku untuk Irigasi, kebutuhan domestik (rumah tangga) dan industri
3. Masih terbatasnya pengembangan jaringan perpipaan air minum
4. Belum semua SPAM yang dibangun oleh pusat dikelola dengan baik
5. Total jalan di kabupaten belitung yang memenuhi standar lebar perkerasan masih dibawah 20%
6. Ketersediaan lahan untuk pembangunan jalan
7. Pengembangan jalan baru masih terkendala IPPKH

Faktor pendorong:

1. Adanya Database potensi sumber air baku
2. Komitmen Pemerintah pusat melalui dana DAK jalan
3. Telah dimulainya perencanaan dan data base permukiman perkotaan dan perdesaan
4. Adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk penanganan kumuh



3.3.2. Telaahan RENSTRA DINAS PUPRPRKP PROVINSI

Rencana Strategis Dinas PUPRPRKP provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dalam pencapaian indikator kinerja yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten.

Tujuan Renstra Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

1) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur

Sasaran Renstra Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu:

a) Meningkatkan layanan pembangunan infrastruktur

Berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung adalah:

a. Faktor Penghambat

- Perencanaan infrastruktur di kabupaten yang merupakan kewenangan provinsi terkadang hanya bersifat normatif (sebatas rapat koordinasi).
- Kegiatan prioritas di provinsi pada kabupaten tidak melihat kepada skala prioritas yang ada di RPJMN.

b. Faktor Pendorong

- Penunjukan kabupaten Belitung sebagai KSPN, KEK, dan UNESCO Global Geopark mendorong skala prioritas kegiatan kewenangan provinsi yang ada di kabupaten
- Transformasi digital sejak pandemi covid-19 mempermudah dilaksanakannya koordinasi melalui daring/*online meeting*.

3.4. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi, wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang dimaksud, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang wilayah Kabupaten Belitung dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu dikelola, dimanfaatkan, dan dilindungi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pelayanan



Dinas PUPR Kabupaten Belitung berpegang pada rencana pola ruang dan struktur ruang wilayah kabupaten serta kawasan strategis kabupaten. Adapun rencana pola ruang terdiri dari:

- a. Kawasan peruntukan lindung, yang meliputi: badan air (BA) seluas kurang lebih 4.232,23 hektar; kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB) seluas kurang lebih 38.902,08 hektar; kawasan perlindungan setempat (PS) seluas kurang lebih 702,29 hektar; kawasan konservasi (KS) seluas kurang lebih 2.557,56 hektar; kawasan lindung geologi (LGE) seluas kurang lebih 1,73 hektar; dan kawasan ekosistem mangrove (EM) seluas kurang lebih 7,87 hektar.
- b. Kawasan peruntukan budidaya, yang meliputi: kawasan hutan produksi; kawasan pertanian; kawasan perikanan; kawasan pertambangan dan energi; kawasan pembangkit tenaga listrik; kawasan peruntukan industri; kawasan pariwisata; kawasan permukiman; dan kawasan transportasi.

Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:

1. Kawasan strategis provinsi
2. Kawasan strategis kabupaten

Kawasan strategis provinsi meliputi:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terdiri atas:
 - i. kawasan Bandar Udara H. AS Hanandjoeddin Tanjungpandan;
 - ii. kawasan industri terpadu Suge dan pelabuhan Tanjung Batu di Kecamatan Badau dan Membalong Kabupaten Belitung;
 - iii. kawasan minapolitan Selat Nasik, Kabupaten Belitung;
 - iv. kawasan industri perikanan Tanjung Binga, Kabupaten Belitung; dan kawasan pariwisata Tanjung Kelayang – Tanjung Tinggi, Kabupaten Belitung
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa Museum Nasional Maritim di Kabupaten Belitung.
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan berupa Cagar Alam Gunung Lalang (Belitung), Taman Kehati di Kabupaten Belitung dan Karantina Hewan di Pulau Nadu Kabupaten Belitung

Kawasan strategis kabupaten meliputi:

- 1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- 2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan



- 3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. Kawasan Geopark Belitung sebagai bagian dari Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG) yang merupakan bagian dari Unesco Global Geopark yang terdapat di Kecamatan Tanjung Pandan, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau dan Kecamatan Membalong;
 - b. Kawasan hutan konservasi Gunung Lalang Tanjungpandan;
 - b. Kawasan Taman Wisata Perairan Belitung di Kecamatan Selat Nasik, Kecamatan Sijuk dan Kecamatan Membalong
 - c. Kawasan hutan mangrove di Kecamatan Selat Nasik, Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Membalong, dan Kecamatan Sijuk;
 - d. Kawasan keanekaragaman hayati di Kecamatan Sijuk dan Kecamatan Membalong;

Perwujudan sistem pusat permukiman terdiri atas:

1. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi PKL;
2. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi PPK;
3. pengembangan kawasan perdesaan melalui pengembangan prasarana, sarana dan utilitas di seluruh Kawasan Perdesaan;
4. mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan Desa Suak Gual;
5. mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan

sementara itu, perwujudan kawasan permukiman, terdiri atas :

1. perwujudan kawasan permukiman perkotaan, meliputi :
 - i. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - ii. pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30 tiga puluh) persen dari luas Kawasan permukiman;
 - iii. penataan Kawasan permukiman baru sesuai standar teknis yang dipersyaratkan;
 - iv. memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni; dan
 - v. perbaikan lingkungan permukiman;
 - vi. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman;



- vii. relokasi perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi.
2. perwujudan kawasan permukiman pedesaan, berupa relokasi perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi
Berdasarkan telaahan RTRW Kabupaten Belitung, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong fungsi pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Belitung adalah:
 - a. Faktor Penghambat
 - Minimnya pemahaman terhadap masyarakat tentang dokumen RTRW;
 - Belum optimalnya penyelenggaraan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang daerah
 - b. Faktor Pendorong
 - Transformasi digital untuk pemanfaatan, dan pengawasan RTRW sudah dalam perencanaan
 - Terdapat Forum Penataan Ruang Daerah

3.5. ISU STRATEGIS

Dari hasil analisa permasalahan pada subbab sebelumnya, maka rumusan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas PUPR, adalah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air
- b. Pemenuhan Standar pelayanan minimal air minum dan sanitasi
- c. Mengoptimalkan pelayanan jalan kabupaten
- d. Mengoptimalkan penyelenggaraan penataan ruang dan bangunan gedung
- e. Mengoptimalkan pembinaan jasa konstruksi dan mutu konstruksi
- f. Mengoptimalkan Penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang belum optimal
- g. Pencegahan terhadap berkembangnya kawasan kumuh perkotaan



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PUPR

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
			2024	2025	2026
Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang		Pemenuhan infrastruktur kePUan dan permukiman Rumusan: $(0,5 \times \text{Pemenuhan Infrastruktur kePUan}) + (0,5 \times \text{Pemenuhan PSU Permukiman})$	45,34%	46,55%	47,96%
	Meningkatnya infrastruktur kePUan	Pemenuhan Infrastruktur kePUan Rumusan: $(0,25 \times \text{jalan standar kabupaten}) + (0,25 \times \text{rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum yang aman}) + (0,25 \times \text{rumah bersanitasi}) + (0,25 \times \text{sumber daya air yang terkelola dengan baik})$	26,17%	27,57%	29,36%
	Meningkatnya infrastruktur Permukiman	Pemenuhan PSU Permukiman Rumusan: $(0,25 \times \text{jalan lingkungan}) + (0,25 \times \text{RTH}) + (0,25 \times \text{RLH korban bencana}) + (0,25 \times \text{RLH korban relokasi program pemerintah})$	64,52%	65,54%	66,56%

4.2. CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH

Cascading kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung sebagaimana terlampir:

CASCADING RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026

OPD ESELON II	Tujuan RPD	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi						
	Sasaran RPD	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan						
	Tujuan	Tujuan 1 : Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang Indikator Tujuan 1 : Persentase pemenuhan infrastruktur ke PUan dan infrastruktur permukiman						
	Sasaran Strategis	Sasaran 1 : Meningkatnya infrastruktur ke Puan Indikator Sasaran 1 : Persentase pemenuhan infrastruktur ke Puan						
BIDANG ESELON III	Program	Program 1						
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
		Sasaran Program						
		Terlaksananya Fasilitasi dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah						
		Indikator Program	Indikator Program	Indikator Program	Indikator Program	Indikator Program	Indikator Program	
Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur					
ESELON IV FUNGSIONAL STAF	Kegiatan	Kegiatan 1.1	Kegiatan 1.2	Kegiatan 1.3	Kegiatan 1.4	Kegiatan 1.5	Kegiatan 1.6	Kegiatan 1.7
		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
		Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan
		Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
		Indikator Kegiatan (Output)	Indikator Kegiatan (Output)	Indikator Kegiatan (Output)	Indikator Kegiatan (Output)	Indikator Kegiatan (Output)	Indikator Kegiatan (Output)	Indikator Kegiatan (Output)
		Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen keuangan perangkat daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jenis barang milik daerah	Barang milik daerah dalam kondisi baik
		Hasil	Hasil	Hasil	Hasil	Hasil	Hasil	Hasil
		Terpenuhinya dokumen perencanaan penanggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan	Terpenuhinya dokumen keuangan sesuai peraturan	Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

CASCADING RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026

OPD ESELON II	Tujuan RPD	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi					
	Sasaran RPD	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan					
	Tujuan	Tujuan 1 : Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang Indikator Tujuan 1 : Persentase pemenuhan insfrastruktur ke PUA dan insfrastruktur permukiman					
	Sasaran Strategis	Sasaran 1 : Meningkatnya insfrastruktur ke Puan Indikator Sasaran 1 : Persentase pemenuhan insfrastruktur ke Puan					
BIDANG ESELON III	Program	Program 2	Program 3	Program 4	Program 5	Program 6	
		Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase	Penataan bangunan gedung	
		Sasaran Program	Sasaran Program	Sasaran Program	Sasaran Program	Sasaran Program	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase	Tertatanya bangunan gedung di kabupaten			
Indikator Program	Indikator Program	Indikator Program	Indikator Program	Indikator Program			
Persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman	Persentase jumlah rumah dengan sistem pengolahan limbah domestik	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar			
ESELON IV FUNGSIONAL STAF	Kegiatan	Kegiatan 2.1	Kegiatan 2.2	Kegiatan 3.1	Kegiatan 4.1	Kegiatan 5.1	Kegiatan 6.1
		Pengelolaan SDA dan bangunan pengamanan pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pengelolaan dan pengembangan sistem air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung
		Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	
		Terkelolanya sumber day air dan bangunan pengamanan pantai, sungai, dan drainase sekunder	Terkelolanya sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi	Terselenggaranya sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota yang dengan baik	Terselenggaranya sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten /kota yang terkelola dengan baik	Terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan	Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan
		Indikator Kegiatan (Output)	Indikator Kegiatan (Output)	Indikator Kegiatan (Output)	Indikator Kegiatan	Indikator Kegiatan	
persentase SDA dan bangunan pengamanan pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang dikelola	Persentase sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) daerah kabupaten / kota yang dikelola dengan Baik	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	Panjang saluran drainase lingkungan	Persentase penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung		
Hasil	Hasil	Hasil (Outcome)	Hasil	Hasil	Hasil		
SDA dan bangunan pengamanan pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (Satu) daerah kabupaten/kota yang terkelola dengan baik	Sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 yang terkelola dengan baik	Sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota yang terkelola dengan baik	Sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota yang terkelola dengan baik	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	Bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota yang terselenggara dengan baik 100%		

CASCADING RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026

OPD ESELON II	Tujuan RPD	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi					
	Sasaran RPD	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan					
	Tujuan	Tujuan 1 : Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang Indikator Tujuan : : Persentase pemenuhan insfrastruktur ke PUan dan insfrastruktur permukiman					
	Sasaran Strategis	Sasaran 1 : Meningkatkan insfrastruktur ke Puan Indikator Sasaran : : Persentase pemenuhan insfrastruktur ke Puan					
BIDANG ESELON III	Program	Program 7	Program 8	Program 9		Program 10	
		Penataan bangunan dan lingkungannya	Penyelenggaraan jalan	Pengembangan jasa konstruksi		Penyelenggaraan penataan ruang	
		Sasaran Program	Sasaran Program	Sasaran Program		Sasaran Program	
		Tertatanya bangunan dan lingkungan	Meningkatnya jalan standar kabupaten	Meningkatnya layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten		Terselenggaranya penataan ruang wilayah kabupaten	
	Indikator Program	Indikator Program	Indikator Program		Indikator Program		
	Persentase tertatanya bangunan dan lingkungan	Persentase jalan standar kabupaten	Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten		Persentase penyelenggaraan penataan ruang		
ESELON IV FUNGSIONAL STAF	Kegiatan	Kegiatan 7.1	Kegiatan 8.1	Kegiatan 9.1	Kegiatan 9.2	Kegiatan 9.3	Kegiatan 10.1
		Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) kabupaten/kota
		Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan
		Terselenggaranya penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten	Terselenggaranya pengelolaan jalan kabupaten	Meningkatnya jumlah tenaga terampil konstruksi di kabupaten	Tersedianya informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten	Terselenggaranya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Ditetapkannya dokumen RTRW dan RDTR kabupaten
	Indikator Kegiatan	Indikator Kegiatan	Indikator Kegiatan	Indikator Kegiatan	Indikator Kegiatan	Indikator Kegiatan	
	Dokumen perencanaan penataan bangunan dan lingkungan di kabupaten/kota	Persentase penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Ketersediaan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten	Laporan hasil ketaatan peraturan jasa konstruksi	Dokumen tata ruang	
	Hasil	Hasil	Hasil	Hasil	Hasil	Hasil	
	Perencanaan penataan bangunan dan lingkungan di kabupaten/kota yang terselenggarakan dengan baik 100%	Tersedianya jalan kabupaten yang terkelola dengan baik 100%	Tenaga terampil bersertifikat	Informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten	Ketaatan peraturan jasa konstruksi	Tersedianya rencana tata ruang yang sesuai dengan peraturan	

CASCADING RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026

OPD ESELON II	Tujuan RPD	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi			
	Sasaran RPD	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan			
	Tujuan	Tujuan 1	: Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang		
	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan 1	: Persentase pemenuhan infrastruktur ke PUan dan infrastruktur permukiman		
BIDANG ESELON III	Program	Sasaran 1	: Meningkatnya infrastruktur ke Puan		
		Indikator Sasaran 1	: Persentase pemenuhan infrastruktur ke Puan		
		Program 10			
		Penyelenggaraan penataan ruang			
		Sasaran Program			
Terselenggaranya penataan ruang wilayah kabupaten					
Indikator Program					
Persentase penyelenggaraan penataan ruang					
ESELON IV FUNGSIONAL STAF	Kegiatan	Kegiatan 10.2	Kegiatan 10.3	Kegiatan 10.4	
		Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota	Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	
		Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten	
		Indikator Kegiatan	Indikator Kegiatan	Indikator Kegiatan	
		Dokumen perencanaan tata ruang	Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan ruang	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	
		Hasil	Hasil	Hasil	
		Perencanaan tata ruang yang terkoordinasi dan tersinkronisasi dengan baik	Pemanfaatan tata ruang yang terkoordinasi dan tersinkronisasi dengan baik	Ketaatan terhadap RTRW	

CASCADING RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026

OPD ESELON II	Tujuan RPD	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi							
	Sasaran RPD	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan							
	Tujuan	Tujuan 1 : Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang Indikator Tujuan 1 : Persentase pemenuhan infrastruktur ke PUan dan infrastruktur permukiman							
	Sasaran Strategis	Sasaran 1 : Meningkatnya infrastruktur Permukiman Indikator Sasaran 1 : Rata-rata Pemenuhan PSU Permukiman							
BIDANG ESELON III	Program	Program 1	Program 2	Program 3	Program 4				
		Pengembangan perumahan	Kawasan Permukiman	Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)				
		Sasaran Program	Sasaran Program	Sasaran Program	Sasaran Program				
		Tersedianya rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	Berkurangnya luasan kawasan pemukiman kumuh	Tertanganinya tumbuh kembang kawasan pemukiman kumuh diluar kawasan kumuh	Meningkatnya prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) di kota dan kawasan permukiman				
	Indikator Program	Indikator Program	Indikator Program	Indikator Program					
	Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana	Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh	Persentase penanganan dan pencegahan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh	Persentase PSU yang dikelola					
ESELON IV FUNGSIONAL STAF	Kegiatan	Kegiatan 1.1	Kegiatan 1.2	Kegiatan 2.1	Kegiatan 2.2	Kegiatan 2.3	Kegiatan 3.1	Kegiatan 4.1	
		Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota	Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Peningkatan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luasan di bawah 10 (sepuluh) Ha	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota	Urusan penyelenggaraan PSU perumahan	
		Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan
		Terlaksananya pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota	Tersedianya rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten yang dibangun dan direhabilitasi	Terlaksananya izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Tertatanya kawasan pemukiman kumuh	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh	Rumah tidak layak huni (RTLH) di diluar kawasan kumuh	Terselenggaranya penyediaan PSU perumahan	
	Indikator Kegiatan	Indikator Kegiatan	Indikator Kegiatan	Indikator Kegiatan	Indikator Kegiatan	Indikator Kegiatan	Indikator Kegiatan	Indikator Kegiatan	
	Dokumen perencanaan pengembangan perumahan	Rumah layak huni bagi korban bencana	Persentase dokumen izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Dokumen penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh	Persentase kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luasan rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Persentase penanganan PSU perumahan		
	Hasil	Hasil	Hasil	Hasil	Hasil	Hasil	Hasil	Hasil	
	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan perumahan	Tersedianya rumah korban bencana yang layak	Tertatanya dan meningkatnya izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Tertatanya dan meningkatnya kualitas permukiman kumuh	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Meningkatnya kualitas rumah layak huni	Meningkatnya kualitas PSU Perumahan		



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dilakukan untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut dijabarkan melalui arah kebijakan sebagai arah pelaksanaan program, kegiatan serta sub kegiatan.

Berdasarkan analisa terhadap faktor-faktor yang saling berpengaruh dari peluang dan tantangan, maka dirumuskan strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan RPD		Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi			
Sasaran RPD		Meningkatnya infrastruktur kewilayahan			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang	Pemenuhan infrastruktur kePUan dan infrastruktur permukiman	Meningkatnya infrastruktur kePUan	Persentase pemenuhan infrastruktur kePUan	1. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan air baku irigasi, kebutuhan domestik dan industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Sumber air baku yang terlindungi baik sumber air baku untuk irigasi, kebutuhan domestik (rumah tangga) dan industri 2. Meningkatkan Pendataan sumber air baku dengan skala prioritas 3. meningkatkan pengendalian sumber daya air dan penanganan banjir 4. Meningkatkan pengamanan pantai dan pemeliharaan alur sungai kewenangan kabupaten 5. Meningkatkan jaringan irigasi



				2. Pemenuhan standar pelayanan minimal air minum dan sanitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan pelayanan air bersih/air minum 2. Meningkatkan sarana dan prasarana air limbah 3. Meningkatkan sarana dan prasarana drainase lingkungan
				3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan standar jalan kabupaten 2. mempertahankan kinerja jalan mantap kabupaten 3. peningkatan jalan non-status menjadi jalan kabupaten
				4. Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang dan wilayah strategis kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong penyusunan PERDA tata ruang, membuat RDTR, dan peraturan zonasi Wilayah Kabupaten 2. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
				5. Meningkatkan penyelenggaraan bangunan gedung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan PBG 2. Meningkatkan Penataan Bangunan dan lingkungan
				6. Meningkatkan pembinaan jasa konstruksi dan mutu konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan dasar jasa konstruksi tingkat kabupaten 2. Meningkatkan mutu konstruksi
		Meningkatnya infrastruktur Permukiman	Rata-rata Pemenuhan PSU Permukiman	1. Meningkatkan prasaranan dan sarana umum kawasan permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan aksesibilitas kawasan permukiman dan perumahan 2. Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau/pertamanan
				2. Penanganan dan Pencegahan kawasan kumuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan kawasan kumuh 2. Rehabilitasi rumah tidak layak huni 3. Pemenuhan rumah layak huni korban bencana dan yang terkena relokasi



					program pemerintah daerah
--	--	--	--	--	---------------------------



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung tahun 2024–2026 yang disertai dengan indikator capaian yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Berikut rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator program yaitu:

1. Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.

Definisi operasional: $(\text{Jumlah dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan} / \text{jumlah dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan yang direncanakan}) \times 100\%$

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, indikator kegiatan yaitu: Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, indikator kegiatan yaitu: Dokumen keuangan Perangkat Daerah.

2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat daerah

Definisi operasional: sesuai perhitungan rumusan Peraturan Kepala BKN nomor 8 tahun 2019 tentang Indeks profesionalitas ASN sesuai dengan form pengukuran indeks profesionalitas ASN.

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, indikator kegiatan yaitu: Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat daerah.



3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah
Definisi operasional: Rata-rata capaian pelayanan administrasi perkantoran (dilihat dari capaian kinerja fisik dari tiap sub kegiatan/ total sub kegiatan) x 100%
Dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Administrasi Umum Perangkat Daerah, indikator kegiatan yaitu: Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah;
 - b) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, indikator kegiatan yaitu: Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.

4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
Definisi operasional: Rata-rata capaian pemenuhan sarana prasarana aparatur (dilihat dari capaian kinerja fisik dari tiap sub kegiatan/ total sub kegiatan) x 100%
Dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, indikator kegiatan yaitu: Jenis barang milik daerah;
 - b) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, indikator kegiatan yaitu: Barang Milik Daerah dalam kondisi baik

B. Program Program Pengelolaan Sumber Daya Air,

dengan indikator program yaitu: Persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik.

Definisi operasional: $(0,4 \times \text{Persentase Luas Sawah Fungsional terlindungi infrastruktur} + (0,6 \times \text{Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai yang terlindungi Infrastruktur}$

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengamanan Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
Indikator kegiatan yaitu: Persentase SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola.
- b) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.



Indikator kegiatan yaitu: Persentase Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha

C. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,

dengan indikator program yaitu: Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman

Definisi operasional: (jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman/Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Belitung) x 100%

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota.

Indikator kegiatan yaitu: Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota.

D. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

dengan indikator program yaitu: Persentase jumlah rumah dengan sistem pengolahan limbah domestik

Definisi operasional: (Jumlah rumah dengan SPALD/Jumlah Rumah di Kabupaten Belitung) x 100%.

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah kabupaten/kota.

Indikator kegiatan yaitu: Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota.

E. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

dengan indikator program yaitu: Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik.

Definisi operasional: (Panjang drainase lingkungan yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara/panjang drainase lingkungan) x 100%

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota.

Indikator kegiatan yaitu: Panjang Saluran drainase lingkungan.



F. Program Penyelenggaraan Jalan

dengan indikator program yaitu: Persentase jalan standar kabupaten.

Definisi operasional: $(\text{Panjang Jalan standar Kabupaten dalam kondisi baik} / \text{total panjang Jalan Standar Kabupaten yang direncanakan}) \times 100\%$

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.

indikator kegiatan yaitu: Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

G. Program Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi

dengan indikator program yaitu: Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten.

Definisi operasional: $(35\% \text{ Izin Usaha Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala} + 10\% \text{ Data Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala} + 10\% \text{ Data Tenaga Kerja Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala} + 10\% \text{ Potensi Pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya} + 10\% \text{ Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang terupdate secara berkala} + 15\% \text{ Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang terupdate setiap 6 bulan} + 10\% \text{ Profil Tim Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota})$.

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.

Indikator kegiatan yaitu: Jumlah Peserta yang Mengikuti pelatihan.

- b) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan yaitu: Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi tingkat kabupaten.

- c) Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Indikator kegiatan yaitu: Laporan Hasil Ketaatan Peraturan Jasa Konstruksi

H. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

dengan indikator program yaitu Persentase penyelenggaraan penataan ruang.



Definisi operasional: $((0,5 \times (\text{Realisasi Dokumen Tata Ruang/Rencana Dokumen Tata Ruang})) + (0,5 \times (\text{Realisasi Dokumen Pemanfaatan Ruang/Rencana Dokumen Pemanfaatan Ruang}))) \times 100\%$.

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) kabupaten/kota.
Indikator kegiatan yaitu: Dokumen tata ruang.
- b) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota.
indikator kegiatan yaitu: Dokumen perencanaan tata ruang.
- c) Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota.
indikator kegiatan yaitu: Dokumen penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang.
- d) Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota.
indikator kegiatan yaitu: Laporan Evaluasi.

I. Program Penataan Bangunan Gedung

dengan indikator program yaitu: Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar.

Definisi operasional: $(\text{Jumlah bangunan gedung yang memiliki sertifikat (IMB/PBG)} / \text{Jumlah bangunan gedung di Kabupaten Belitung}) \times 100\%$.

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
Indikator kegiatan yaitu: Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

J. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

dengan indikator program yaitu: Persentase tertatanya bangunan dan lingkungan.

Definisi operasional: $(\text{Jumlah rencana penyusunan dokumen PBL di tahun } n / \text{jumlah total rencana penyusunan dokumen PBL}) \times 100\%$.

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.



Indikator kegiatan yaitu: Dokumen Perencanaan penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota.

K. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

dengan indikator program yaitu: Persentase PSU yang dikelola.

Definisi operasional: (rencana PSU yang dikelola yaitu: (luas area jalan lingkungan+ luas area PSU perumahan + luas area taman kota)/jumlah luasan seluruh PSU) x 100%.

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Urusan penyelenggaraan PSU perumahan, indikator kegiatan yaitu :
Persentase penanganan PSU.

L. Program Kawasan Permukiman

dengan indikator program yaitu: Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh.

Definisi operasional: (jumlah pengurangan kawasan kumuh/total luas Kawasan kumuh) x 100%

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luasan di bawah 10 (sepuluh) Ha, indikator kegiatan yaitu : Dokumen penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh.

M. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

dengan indikator program yaitu: Persentase Penanganan dan pencegahan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh.

Definisi operasional: (luas pencegahan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh/luas permukiman) x 100%

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota, indikator kegiatan yaitu : Luasan rumah tidak layak huni yang diperbaiki.

N. Program Pengembangan Perumahan

dengan indikator program yaitu: Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana.



Definisi operasional: $(\text{jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n / \text{jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani}) \times 100\%$

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota, indikator kegiatan yaitu : Dokumen perencanaan pengembangan perumahan.
- b) Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota, indikator kegiatan yaitu : Rumah layak huni bagi korban bencana

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana *strategis* yang diarahkan untuk mencapai tujuan sasaran serta misi dan visi pemerintah daerah.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis pada awalnya mengalami penyesuaian yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan sebagai pedoman operasional kegiatan selanjutnya. Program dan kegiatan prioritas yang telah dievaluasi tersebut terdapat dalam Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2024								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (8-d akhir)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi			
						2024		2025		2026										
						target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12)					
1.1	Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang	1.1.1	Meningkatnya Infrastruktur kePUan	Pemenuhan Infrastruktur kePUan dan permukiman	n/a %	45,34 %	208.717,63	46,55 %	246.429,86	47,96 %	206.736,57	47,96 %	661.884,06							
				Persentase pemenuhan Infrastruktur kePUan	n/a	26,17 %	182.966,69	27,57 %	219.348,93	29,36 %	177.920,08	29,36	580.235,69							
		1	03	01	15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.123,01	13.366,01	13.369,11	40.858,14	DPUPR	Kab. Belitung						
		1	03	01		1. Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan		100 %	100 %	10.820,01	100 %	10.821,81	100 %	32.462,74	DPUPR	Kab. Belitung				
		1	03	01	2.01	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan	7 Dokumen 100 %	9 Dokumen 100 %	25,54 100 %	9 Dokumen 100 %	26,14 100 %	9 Dokumen 100 %	26,74 100 %	27 Dokumen 100 %	78,42			
		1	03	01	2.01	01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	5,00	2 Dokumen	5,10	2 Dokumen	5,20	6 Dokumen	15,30		
		1	03	01	2.01	02	2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,00	1 Dokumen	2,10	1 Dokumen	2,20	3 Dokumen	6,30		
		1	03	01	2.01	03	3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,00	1 Dokumen	2,10	1 Dokumen	2,20	3 Dokumen	6,30		
		1	03	01	2.01	04	4	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,00	1 Dokumen	2,10	1 Dokumen	2,20	3 Dokumen	6,30		
		1	03	01	2.01	05	5	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,00	1 Dokumen	2,10	1 Dokumen	2,20	3 Dokumen	6,30		
		1	03	01	2.01	07	6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	3 Laporan	12,54	3 Laporan	12,64	3 Laporan	12,74	9 Laporan	37,92		
		1	03	01	2.02		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen keuangan sesuai peraturan	3 Dokumen 100 %	3 Dokumen 100 %	10.794,47 100 %	3 Dokumen 100 %	10.794,77 100 %	3 Dokumen 100 %	10.795,07 100 %	9 Dokumen 100 %	32.384,32		
		1	03	01	2.02	01	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran : Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	50 Orang/bulan	10.786,47	50 Orang/bulan	10.786,57	50 Orang/bulan	10.786,67	150 Orang/bulan	32.359,72		
		1	03	01	2.02	05	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3,00	1 Laporan	3,10	1 Laporan	3,20	3 Laporan	9,30		
		1	03	01	2.02	08	3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran : Jumlah Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	5,00	2 Dokumen	5,10	2 Dokumen	5,20	6 Dokumen	15,30		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (e-d akhir)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						target	Rp (lt)	target	Rp (lt)	target	Rp (lt)	target	Rp (lt)		
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
				2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	66,37 %	67 %	340,10	69 %	340,50	71 %	340,90	75 %	1.021,50		
		1 03 01 2.05	3 Adminlstrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Keluaran : Terpenuhinya adminlstrasi Kepegawalan Perangkat Daerah Hasil : Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	49 Orang	50 Orang	340,10	50 Orang	340,50	50 Orang	340,90	50 Orang	1.021,50		
		1 03 01 2.05 01	1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Keluaran : Jumlah unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	1 Unit	5,10	1 Unit	5,20	1 Unit	5,30	3 Unit	15,60		
		1 03 01 2.05 02	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran : Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	1 Paket	30,00	1 Paket	30,10	1 Paket	30,20	3 Paket	90,30		
		03 01 2.05 05	3 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dokum en	19 Dokum en	5,00	19 Dokum en	5,10	19 Dokum en	5,20	57 Doku men	15,30		
		1 03 01 2.05 09	4 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran : Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 Orang	19 Orang	300,00	19 Orang	300,10	19 Orang	300,20	57 Orang	900,30		
				3. Persentase Pelayanan Adminlstrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.454,90	100 %	1.456,00	100 %	1.457,10	100 %	4.368,00		
		1 03 01 2.06	4 Adminlstrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Terpenuhinya adminlstrasi umum Perangkat Daerah Hasil : Persentase pelayanan adminlstrasi perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.081,00	100 %	1.081,70	100 %	1.082,40	100 %	3.245,10		
		1 03 01 2.06 01	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Jumlah paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	5,00	1 Paket	5,10	1 Paket	5,20	3 Paket	15,30		
		1 03 01 2.06 02	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	190,00	1 Paket	190,10	1 Paket	190,20	3 Paket	570,30		
		1 03 01 2.06 03	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran : Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	9,00	1 Paket	9,10	1 Paket	9,20	3 Paket	27,30		
		1 03 01 2.06 04	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran : Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	150,00	1 Paket	150,10	1 Paket	150,20	3 Paket	450,30		
		1 03 01 2.06 05	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : Jumlah paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	62,00	1 Paket	62,10	1 Paket	62,20	3 Paket	186,30		
		1 03 01 2.06 06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Jumlah dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokum en	1 Dokum en	15,00	1 Dokum en	15,10	1 Dokum en	15,20	3 Doku men	45,30		
		1 03 01 2.06 09	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran : Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 lapora n	12 laporan	650,00	12 lapora n	650,10	12 lapora n	650,20	36 lapora n	1.950,30		
		1 03 01 2.08	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Pemenuhan kebutuhan layanan adminlstrasi perkantoran Hasil : Persentase pelayanan adminlstrasi perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	373,90	100 %	374,30	100 %	374,70	100 %	1.122,90		
		1 03 01 2.08 01	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Keluaran : Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Lapora n	12 Laporan	3,70	12 Lapora n	3,80	12 Lapora n	3,90	36 Lapora n	11,40		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2024						2025						2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (e-d akhir)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						target		Rp (t)		target		Rp (t)		target		Rp (t)		target		Rp (t)						
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)			(8)			(9)			(10)			(11)	(12)					
		1	03	01	2.08	02	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran :	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	144,00	12 Laporan	144,10	12 Laporan	144,20	36 Laporan	432,30							
		1	03	01	2.08	03	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	27,00	12 Laporan	27,10	12 Laporan	27,20	36 Laporan	81,30							
		1	03	01	2.08	04	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran :	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	199,20	12 Laporan	199,30	12 Laporan	199,40	36 Laporan	597,90							
										4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	1.508,00	100 %	748,60	100 %	749,30	100 %	3.005,90							
		1	03	01	2.07		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran :	Jenis Barang Milik Daerah	7 Jenis	15 Jenis	670,00	12 Jenis	310,20	11 Jenis	310,50	38 Jenis	1.290,70							
								Hasil :	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %								
		1	03	01	2.07	02	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran :	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 Unit	1 Unit	320,00	2 Unit	60,00	2 Unit	60,10	5 Unit	440,10							
		1	03	01	2.07	05	2	Pengadaan Mebel	Keluaran :	Jumlah paket mebel yang disediakan	4 Unit	4 Unit	50,00	3 Unit	50,10	2 Unit	50,20	9 Unit	150,30							
		1	03	01	2.07	06	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran :	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	6 Unit	9 Unit	100,00	6 Unit	100,10	6 Unit	100,20	21 Unit	300,30							
		1	03	01	2.07	11	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran :	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	200,00	1 Unit	100,00	1 Unit	100,00	3 Unit	400,00							
		1	03	01	2.09		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran :	Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	838,00	100 %	438,40	100 %	438,80	100 %	1.715,20							
								Hasil :	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %								
		1	03	01	2.09	01	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran :	Jumlah kendaraan perorangan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit	4 Unit	40,00	4 Unit	40,10	4 Unit	40,20	12 Unit	120,30							
		1	03	01	2.09	02	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran :	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	21 Unit	21 Unit	138,00	21 Unit	138,10	21 Unit	138,20	63 Unit	414,30							
		1	03	01	2.09	05	3	Pemeliharaan Mebel	Keluaran :	Jumlah Mebel yang dipelihara	80 Unit	80 Unit	10,00	80 Unit	10,10	80 Unit	10,20	240 Unit	30,30							
		1	03	01	2.09	06	4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran :	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	65 Unit	65 Unit	50,00	65 Unit	50,10	65 Unit	50,20	195 Unit	150,30							
		1	03	01	2.09	09	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran :	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	600,00	1 Unit	200,00	1 Unit	200,00	3 Unit	1.000,00							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2024						2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (e-d akhir)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						target		Rp (t)		target		Rp (t)		target		Rp (t)			
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12)	
		1	03	02	13	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase sumber daya air yang dikelola dengan baik	43,03 %	49,91 %	17.301,37	52,82 %	15.185,37	57,03 %	14.509,57	57,03 %	46.996,31	DPUPR	Kab. Belitung	
		1	03	02	2.01	1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantal pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : persentase SDA dan Bangunan Pengaman Pantal pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola Hasil : SDA dan Bangunan Pengaman Pantal pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola dengan baik	100 %	100 %	10.288,93	100 %	8.002,93	100 %	6.827,13	100 %	25.118,99			
		1	03	02	2.01	03	1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantal	Keluaran : Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	3 Dokumen	4 Dokumen	400,00	2 Dokumen	200,00	2 Dokumen	200,00	8,00 Dokumen	800,00		
		1	03	02	2.01	2	2 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Keluaran : Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	0 Dokumen	2 Dokumen	200,00	2 Dokumen	200,00	2 Dokumen	200,00	6,00 Dokumen	600,00		
		1	03	02	2.01	09	3 Pembangunan Tanggul Sungai	Keluaran : Panjang Tanggul Sungai yang dibangun	Km	0,500 Km	1.168,00	0,500 Km	1.168,00	0,500 Km	1.168,00	1,50 Km	3.504,00		
		1	03	02	2.01	10	4 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Keluaran : Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,1035 Km	0,300 Km	1.375,80	0,300 Km	1.375,80	- Km	-	0,60 Km	2.751,60		
		1	03	02	2.01	21	7 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Keluaran : Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	0 unit			2 Unit	400,00	2 Unit	400,00	4,00 Unit	800,00		
		1	03	02	2.01	24	9 Rehabilitasi Tanggul Sungai	Keluaran : Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0,06 Km	0,400 Km	775,20	0,400 Km	775,20	0,400 Km	775,20	1,20 Km	2.325,60		
		1	03	02	2.01	25	10 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Keluaran : Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0,154 Km			0,200 Km	558,80	0,200 Km	558,80	0,40 Km	1.117,60		
		1	03	02	2.01	34	11 Peningkatan Tanggul Sungai	Keluaran : Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	0,283 Km	1,000 Km	3.806,00	0,200 Km	761,20	0,200 Km	761,20	1,40 Km	5.328,40		
		1	03	02	2.01	35	12 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Keluaran : Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0 Km	0,200 Km	917,20	0,200 Km	917,20	0,200 Km	917,20	0,60 Km	2.751,60		
		1	03	02	2.01	52	13 Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Keluaran : Panjang Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Km	0,160 Km	400,00	0,160 Km	400,00	0,240 Km	600,00	0,56 Unit	1.400,00		
		1	03	02	2.01	65	14 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Keluaran : Panjang sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Km	3,000 Km	1.182,00	3,000 Km	1.182,00	3,000 Km	1.182,00	9,00 Km	3.546,00		
		1	03	02	2.01	62	15 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	64,73	1 Dokumen	64,73	1 Dokumen	64,73	3,00 Dokumen	194,19		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (e-d akhir)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						target	Rp (lt)	target	Rp (lt)	target	Rp (lt)	target	Rp (lt)		
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
		1 03 02 2.02	2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Persentase Slatem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Dikelola dengan Baik Hasil : Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 yang terkelola dengan baik	100 %	100 %	7.012,44	100 %	7.182,44	100 %	7.682,44	100 %	21.877,32		
		1 03 02 2.02 01	1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Keluaran : Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	5 Dokumen	2 Dokumen	200,00	2 Dokumen	200	2 Dokumen	200	6,000 Dokumen	600,00		
		1 03 02 2.02 02	2 Pembangunan Jaringan irigasi Permukaan	Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun	0,49 Km	0,170 Km	397,12	0,170 Km	397,12	0,170 Km	397,12	0,510 Km	1.191,36		
		1 03 02 2.02 08	3 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,224 Km	0,700 Km	1.635,20	0,700 Km	1.635,20	0,700 Km	1.635,20	2,100 Km	4.905,60		
		1 03 02 2.02 14	4 Rehabilitasi jaringan irigasi Permukaan	Keluaran : panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	0,125 Km	0,240 Km	465,12	0,240 Km	465,12	0,240 Km	465,12	0,720 Km	1.395,36		
		1 03 02 2.02 14	5 Rehabilitasi jaringan irigasi Permukaan (DAK)	Keluaran : panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	0 Km	10,138 Km	3.330,00	10,800 Km	3.500,00	11,200 Km	4.000,00	32,138 Km	10.830,00		
		1 03 02 2.02 21	6 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,731 Km	2,500 Km	985,00	2,500 Km	985,00	2,500 Km	985,00	7,500 Km	2.955,00		
		1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman	16,52 %	18,30 %	9.832,10	19,75 %	11.264,38	21,51 %	13.189,02	21,51 %	34.285,49	DPUPR	Kab. Belitung
		1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Hasil : Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang terkelola dengan baik	100 %	100 %	9.832,10	100 %	11.264,38	100 %	13.189,02	100 %	34.285,49		
		1 03 03 2.01 01	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Keluaran : Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	350,00	1 Dokumen	300,00	1 Dokumen	300,00	3,000 Dokumen	950,00		
		1 03 03 2.01 02	2 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Keluaran : Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	1 Dokumen	2 Dokumen	150,00	2 Dokumen	150,00	2 Dokumen	150,00	6,000 Dokumen	450,00		
		1 03 03 2.01 04	3 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Keluaran : Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	432 SR	615,00 SR	3.099,6	656 SR	3.444,00	656 SR	3.616,20	1.927,000 SR	10.159,80		
		1 03 03 2.01 07	4 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Keluaran : Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	100 SR	330 SR	1.732,50	430 SR	2.370,38	530 SR	3.622,82	1.290,000 SR	7.725,69		
		1 03 03 2.01 15	6 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Keluaran : Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	17 Unit	18 Unit	4.500,00	19 Unit	5.000,00	19 Unit	5.500,00	56,000 Unit	15.000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2024						2025						2026						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						target		Rp (t)		target		Rp (t)		target		Rp (t)		target		Rp (t)					
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)				(8)				(9)				(10)				(11)	(12)	
		1	03	05	2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah rumah dengan sistem pengolahan limbah domestik	n/a	8,20 %	3.800,00	8,69 %	3.800,00	9,16 %	3.800,00	9,16	11.400,00	DPUPR	Kab. Belitung							
		1	03	05	2.01	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota	Keluaran : Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota Hasil : Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota yang terkelola dengan baik	100 % 100 %	100 % 100 %	3.800,00	100 % 100 %	3.800,00	100 % 100 %	3.800,00	100 % 100 %	11.400,00									
		1	03	05	2.01	01 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	3,000 Dokumen	300,00									
		1	03	05	2.01	03 2 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Keluaran : Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	335 Rumah Tangga	250 Rumah Tangga	3.500,00	250 Rumah Tangga	3.500,00	250 Rumah Tangga	3.500,00	750.000 Rumah Tangga	10.500,00									
		1	03	05	2.01	08 3 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat rangka penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Keluaran : Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	4 Kelompok	10 Kelompok	100,00	10 Kelompok	100,00	10 Kelompok	100,00	30.000 Kelompok	300,00									
		1	03	05	2.01	11 4 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Keluaran : Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	3,000 Dokumen	300,00									
		1	03	06	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	20,02 %	22,00 %	1.800,00	29,59 %	1.800,00	39,57 %	1.800,00	39,57 %	5.400,00	DPUPR	Kab. Belitung							
		1	03	06	2.01	1 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Panjang Saluran drainase lingkungan Hasil : Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	1515 m 100 %	5400 m 100 %	1.800,00	5400 m 100 %	1.800,00	5400 m 100 %	1.800,00	16.200 M2 100 %	5.400,00									
		1	03	06	2.01	05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Keluaran : Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	0 M	3000 M	1.000,00	3000 M	1.000,00	3000 M	1.000,00	9.000.000 M	3.000,00									
		1	03	06	2.01	06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Keluaran : Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	0 M	600 M	200,00	600 M	200,00	600 M	200,00	1.800.000 M	600,00									
		1	03	06	2.01	12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Keluaran : Panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun	1515 M	1500 M	500,00	1500 M	500,00	1500 M	500,00	4.500.000 M	1.500,00									
		1	03	06	2.01	14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Keluaran : Panjang saluran drainase lingkungan yang dilakukan Rehabilitasi	0 M	300 M	100,00	300 M	100,00	300 M	100,00	900.000 M	300,00									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (e-d akhir)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi	
						target	Rp (lt)	target	Rp (lt)	target	Rp (lt)	target	Rp (lt)			
						(7)		(8)		(9)		(10)				
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12)	
		1 03 08	5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar	n/a %	4,79 %	2.270,00	5,22 %	2.270,00	5,64 %	2.270,00	5,64 %	6.810,00	DPUPR	Kab. Belitung
		1 03 08 2.01	1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Hasil : Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang terseleenggara dengan baik	100 %	100 %	2.270,00	100 %	2.270,00	100 %	2.270,00	100 %	6.810,00		
		1 03 08 2.01 01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		61 Dokumen	200 Dokumen	850,00	200 Dokumen	850,00	200 Dokumen	850,00	600,000 Dokumen	2.550,00		
		1 03 08 2.01 02	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	2 Dokumen	200,00	2 Dokumen	200,00	2 Dokumen	200,00	6,000 Dokumen	600,00		
		1 03 08 2.01 05	3	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	3,000 Dokumen	300,00		
		1 03 08 2.01 09	4	Penilaian Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilaian oleh Penilik Bangunan	0 Unit	200 Unit	100,00	200 Unit	100,00	200 Unit	100,00	600,000 Unit	300,00		
		1 03 08 2.01 11	5	Pemeriksaan Kelangkaan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Keluaran : Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelangkaan Fungsi	0 Unit	30 Unit	20,00	30 Unit	20,00	30 Unit	20,00	90,000 Unit	60,00		
		1 03 08 2.01 12	6	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsua Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsua	0 Unit	5 Unit	1.000,00	5 Unit	1.000,00	5 Unit	1.000,00	15,000 Unit	3.000,00		
		1 03 09	6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Tertatanya Bangunan dan Lingkungan	15,00 %	33,33 %	300,00	46,67 %	500,00	60,00 %	500,00	60,00 %	1.300,00	DPUPR	Kab. Belitung
		1 03 09 2.01	1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Dokumen Perencanaan penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota Hasil : Perencanaan penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota yang terseleenggara dengan baik	3 Dokumen	1 Dokumen	300	1 Dokumen	500	3 Dokumen	500	5 Dokumen	1300		
		1 03 09 2.01 01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1,00 Dokumen	100,00	1,00 Dokumen	300,00	3,00 Dokumen	300,00	5,000 Dokumen	700,00		
		1 03 09 2.01 02	2	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Keluaran : Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	1,00 Kawasan	100,00	1,00 Kawasan	100,00	1,00 Kawasan	100,00	3,000 Kawasan	300,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2024						2025						2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (e-d akhir)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						target		Rp (lt)		target		Rp (lt)		target		Rp (lt)		target		Rp (lt)						
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)				(8)				(9)				(10)		(11)	(12)			
		1	03	09	2.01	03	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Keluaran :	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawas an	1,00	Kawas an	100,00	1,00	Kawas an	100,00	1,00	Kawas an	100,00	3,000	Kawas an	300,00			
		1	03	10		12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase jalan standar kabupaten		26,75 %	28,25	129.561,00	29,00 %	167.857,15	29,760 %	125.025,25	29,76 %	422.443,40	DPUPR	Kab. Belitung					
		1	03	10	2.01		1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Keluaran :	Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	%	100 %	129.561,00	100 %	167.857,15	100 %	125.025,25	100 %	422.443,40							
									Hasil :	Tersedianya jalan kabupaten yang terkelola dengan baik	%	100 %		100 %		100 %		100 %								
		1	03	10	2.01	01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	17 Dokum en	8 Dokum en	1.200,00	12 Dokum en	1.800,00	8 Dokum en	1.200,00	28,00	Doku men	4.200,00						
		1	03	10	2.01	02	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Keluaran :	Luas lahan yang tersedia untuk penyelenggaraan jalan	0 M2	4.500 M2	2.000,00	4.500 M2	2.000	4.500 M2	2.000	13.500,00	M2	6.000,00						
		1	03	10	2.01	03	3	Pengelolaan Leger Jalan	Keluaran :	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	1 Dokum en	1 Dokum en	192,22	1 Dokum en	192,22	1 Dokum en	192,22	3,00	Doku men	576,66						
		1	03	10	2.01	04	4	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Keluaran :	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	5 Dokum en	5,00 Dokum en	500,00	5,00 Dokum en	500,00	5,00 Dokum en	500,00	15,00	Doku men	1.500,00						
		1	03	10	2.01	05	5	Pembangunan Jalan	Keluaran :	Panjang jalan yang dibangun	13,41 Km	8,78 Km	36.472,73	5,05 Km	35.160,41	14,51 Km	59.304,38	28,34 Km	130.937,52							
		1	03	10	2.01	06	6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Keluaran :	Panjang jalan yang dilakukan pelebaran menuju standar	3,5 Km	10,38 Km	37.492,56	14,79 Km	53.421,48	2,50 Km	9.030,00	27,67 Km	99.944,04							
		1	03	10	2.01	10	7	Pemeliharaan Berkala Jalan	Keluaran :	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	5,56 Km	22,54 Km	34.555,17	33,61 Km	51.537,57	26,14 Km	40.084,61	82,29 Km	126.177,35							
		1	03	10	2.01	11	8	Pemeliharaan Rutin Jalan	Keluaran :	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	580,67 Km	666,02 Km	12.114,04	666,02 Km	12.114,04	666,02 Km	12.114,04	666,02	Km	36.342,12						
		1	03	10	2.01	12	9	Pembangunan Jembatan	Keluaran :	Panjang Jembatan yang Dibangun	- m	16,00 m	4.434,29	38,00 m	10.531,43			54,00 m	14.965,71							
		1	03	10	2.01	19	9	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Keluaran :	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	20 m	150,00 M	600,00	150,00 M	600,00	150,00 M	600,00	150,00 M	1.800,00							
		1	03	11		7	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten		60 %	60,00 %	1.744,20	60,00 %	1.276,02	60,00 %	1.377,13	60,00 %	4.397,36	DPUPR	Kab. Belitung					
		1	03	11	2.01		1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Keluaran :	Jumlah Peserta yang Mengikuti pelatihan	40,00 Orang	35,00 Orang	200,00	35,00 Orang	220,00	35,00 Orang	242,00	35,00 Orang	662,00							
									Hasil :	Tenaga Terampil bersertifikat	75,00 %	75,00 %		75,00 %		75,00 %		75,00 %								
		1	03	11	2.01	04	1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Keluaran :	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	40 Orang	35,00 Orang	200,00	35 Orang	220,00	35 Orang	242,00	105,00	Orang	662,00						
		1	03	11	2.02		2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran :	Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi tingkat kabupaten	n/a	1,00 Laporan	30,60	1 Laporan	33,66	1 Laporan	37,03	1 Laporan	101,29							
									Hasil :	Informasi Jasa Konstruksi tingkat kabupaten	75,00 %	75,00 %		75,00 %		75 %		75 %								
		1	03	11	2.02	06	1	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Keluaran :	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	n/a	1,00 Dokum en	30,60	1 Dokum en	33,66	1 Dokum en	37,03	3,00	Laporan	101,29						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (e-d akhir)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						target	Rp (lt)	target	Rp (lt)	target	Rp (lt)	target	Rp (lt)		
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
		1 03 11 2.04	3 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Keluaran : Laporan Hasil Ketaatan Peraturan Jasa Konstruksi Hasil : Ketaatan Peraturan Jasa Konstruksi	n/a	2,00 Laporan	1.513,80	2,00 Laporan	1.022,36	2,00 Laporan	1.098,10	6 Laporan	3.634,07		
		1 03 11 2.04 01	1 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Keluaran : Tersusunnya SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	n/a	1,00 Laporan	17,50	1 Laporan	19,25	1 Laporan	21,18	3,00 Laporan	57,93		
		1 03 11 2.04 03	2 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Keluaran : Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	n/a	12,00 Laporan	1.496,10	12 Laporan	1.003,11	12 Laporan	1.076,93	36,00 Laporan	3.576,14		
		1 03 12 14	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	98,24 %	100 %	2.235,00	100 %	2.030,00	100 %	2.080,00	100 %	6.345,00	DPUPR	Kab. Belitung
		1 03 12 2.01	1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Keluaran : Dokumen tata ruang Hasil : Tersedianya rencana tata ruang yang sesuai dengan peraturan	2 Dokumen	5 Dokumen	325,00	4 Dokumen	235,00	3 Dokumen	225,00	12,00 Dokumen	785,00		
		1 03 12 2.01 01	1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	90,00					1,00 Dokumen	90,00		
		1 03 12 2.01 02	2 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	115,00	1 Dokumen	115,00	1 Dokumen	115,00	3,00 Dokumen	345,00		
		1 03 12 2.01 04	3 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Keluaran : Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	0 Dokumen	3 Dokumen	120,00	3 Dokumen	120,00	2 Dokumen	110,00	8,00 dokumen	350,00		
		1 03 12 2.02	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Dokumen perencanaan tata ruang Hasil : Perencanaan tata ruang yang terkoordinasi dan tersinkronisasi dengan baik	2 Dokumen	3 Dokumen	1.050,00	2 Dokumen	975,00	2,00 Dokumen	1.025,00	7,00 Dokumen	3.050,00		
		1 03 12 2.02 02	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	4 Dokumen	3 Dokumen	1.050,00	2 Dokumen	975,00	2 Dokumen	1.025,00	7,00 Dokumen	3.050,00		
		1 03 12 2.03 03	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Dokumen penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang Hasil : Pemanfaatan tata ruang yang terkoordinasi dan tersinkronisasi dengan baik	3	5 Dokumen	800,00	5 Dokumen	750,00	5 Dokumen	750,00	15,00 Dokumen	2.300,00		
		1 03 12 2.03 01	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	4 Dokumen	700,00	4 Dokumen	650,00	4 Dokumen	650,00	12,00 Dokumen	2.000,00		
		1 03 12 2.03 02	2 Sistem Informasi Tata Ruang	Keluaran : Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	3,00 Dokumen	300,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (e-d akhir)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						target	Rp (lt)	target	Rp (lt)	target	Rp (lt)	target	Rp (lt)		
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
		1 03 12 2.04	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Hasil : Ketaatan terhadap RTRW	1 Dokumen 100 %	1 Dokumen 100 %	60,00	1 Dokumen 100 %	70,00	1 Dokumen 100 %	80,00	3,00 Dokumen 100 %	210,00		
		1 03 12 2.04 04	1 Koordinasi Pelaksanaan Tata Ruang Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen 100 %	1 Dokumen 100 %	60,00	1 Dokumen 100 %	70	1 Dokumen 100 %	80,00	3,00 Dokumen 100 %	210,00		
	1.1.1. Meningkatkan Infrastruktur Perumahan			Rata-rata Pemenuhan PSU Perumahan	n/a	64,52 %	25.750,95	65,54 %	27.080,93	66,56 %	28.816,50	66,56	81.648,37		
		1 04 02	8 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana	- %	100,00 %	389,95	100 %	386,95	100 %	405,64	100 %	1.162,53	DPUPR	Kab. Belitung
		1 04 02 2.01	1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Keluaran : Dokumen perencanaan pengembangan perumahan Hasil : tersedianya dokumen perencanaan pengembangan perumahan	1 Dokumen 100 %	2 Dokumen 100 %	200,00	2 Dokumen 100 %	200,00	2 Dokumen 100 %	200,00	6 Dokumen 100 %	600,00		
		1 04 02 2.01 04	1 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Keluaran : Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen 100 %	1 Dokumen 100 %	100,00	1 Dokumen 100 %	100,00	1 Dokumen 100 %	100,00	3,00 Dokumen 100 %	300,00		
		1 04 02 2.01 06	2 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Keluaran : Jumlah Dokumen data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	0 Dokumen 0 %	1 Dokumen 100 %	100,00	1 Dokumen 100 %	100,00	1 Dokumen 100 %	100,00	3,00 Dokumen 100 %	300,00		
		1 04 02 2.03	2 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Keluaran : Rumah layak huni bagi korban bencana Hasil : Tersedianya rumah korban bencana yang layak	0 Unit Rumah 0 %	2 Unit Rumah 100 %	169,95	2,00 Unit Rumah 100 %	186,95	2 Unit Rumah 100 %	205,64	6 Unit Rumah 100 %	562,53		
		1 04 02 2.03 04	1 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Keluaran : Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	0 Unit Rumah 0 %	2 Unit Rumah 100 %	169,95	2 Unit Rumah 100 %	186,95	2 Unit Rumah 100 %	205,64	6,00 Unit Rumah 100 %	562,53		
		1 04 03	9 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan Luasan kawasan kumuh	0,34 %	0,20 %	12.747,43	0,18 %	13.514,50	0,16 %	14.478,79	0,16 %	40.740,72	DPUPR	Kab. Belitung
		1 04 03 2.01	1 Peningkatan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan	Keluaran : Persentase Dokumen Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan Hasil : Tertatanya dan meningkatnya Izin pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan	n/a n/a	100 % 100 %	50,00	100 % 100 %	50,00	100 % 100 %	50,00	100 % 100 %	150,00		
		1 04 03 2.01 02	1 Penyusunan data/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Perumahan Kumuh	Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Perumahan Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	0 Dokumen 0 %	1 Dokumen 100 %	50,00	1 Dokumen 100 %	50,00	1 Dokumen 100 %	50,00	3,00 Dokumen 100 %	150,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (e-d akhir)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						target	Rp (lt)	target	Rp (lt)	target	Rp (lt)	target	Rp (lt)		
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
		1 04 03 2.02	1 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Keluaran : Dokumen penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh Hasil : Tertatanya dan meningkatnya kualitas permukiman kumuh	2 Dokumen 100 %	3 Dokumen 100 %	197,43	3 Dokumen 100 %	339,50	3 Dokumen 100 %	647,54	9 Dokumen 100 %	1.184,47		
		1 04 03 2.02 01	1 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Keluaran : Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00	1 Dokumen	20,00	1 Dokumen	20,00	3,00 Dokumen	60,00		
		1 04 03 2.02 02	2 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Keluaran : Jumlah Dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	77,43	1 Dokumen	219,50	1 Dokumen	527,54	3,00 Dokumen	824,47		
		1 04 03 2.02 08	3 Penyusunan / Review / Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	3,00 Dokumen	300,00		
		1 04 03 2.03	3 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Keluaran : Persentase Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Hasil : Meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	n/a n/a	100 % 100 %	12.500,00	100 % 100 %	13.125,00	100 % 100 %	13.781,25	100 % 100 %	39.406,25		
		1 04 03 2.03 06	Peleaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (DAK)	Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		7,68 Ha	12.500,00	7,68 Ha	13.125,00	7,68 Ha	13.781,25	7,68 Ha	39.406,25		
		1 04 04 10	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan dan pencegahan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh	99,66 %	99,80 %	1.301,45	99,82 %	1.564,07	99,84 %	2.026,27	99,84 %	4.891,79	DPUPR	Kab. Belitung
		1 04 04 2.01	1 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Luasan rumah layak huni yang diperbaiki Hasil : Meningkatnya kualitas rumah layak huni	797 m2 100 %	540 m2 100 %	1.301,45	600 m2 100 %	1.564,07	720 m2 100 %	2.026,27	1.860 m2 100 %	4.891,79		
		1 04 04 2.01 01	1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	24 Unit Rumah	18 Unit Rumah	1.301,45	20,00 Unit Rumah	1.564,07	24 Unit Rumah	2.026,27	62,00 Unit Rumah	4.891,79		
		1 04 05 11	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	persentase PSU yang dikelola	44,90 %	66,02 %	11.332,11	69,84 %	11.615,42	73,66 %	11.905,80	73,66 %	34.853,33	DPUPR	Kab. Belitung
		1 04 05 2.01	1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Keluaran : Persentase penanganan PSU Perumahan Hasil : Menigkatnya kualitas PSU Perumahan	100 % 100 %	100 % 100 %	11.332,11	100 % 100 %	11.615,42	100 % 100 %	11.905,80	100 % 100 %	34.853,33		
		1 04 05 2.01 01	1 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	3,00 Dokumen	300,00		
		1 04 05 2.01 02	2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Keluaran : Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	38 Lokasi	31 Lokasi	11.232,11	33 Lokasi	11.515,42	35 Lokasi	11.805,80	99,00 Lokasi	34.553,33		
							208.717,634		246.429,857		206.736,574		661.884,065		

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)			
						target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)		
(1)	(2)	(1)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12)
1.1 Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang	1.1.1 Meningkatnya Infrastruktur kePUan			Pemenuhan Infrastruktur kePUan dan permukiman	n/a %	45,34 %	208.717,63	46,55 %	246.429,86	47,96 %	206.736,57	47,96 %	661.884,06		
				Pemenuhan Infrastruktur kePUan	n/a %	26,17 %	182.966,69	27,57 %	219.348,93	29,36 %	177.920,08	29,36 %	580.235,69		
		1 03 01 15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.123,01		13.366,01		13.369,11		40.858,14	DPUPR	Kab. Belitung	
		1 03 01		1. Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	10.820,01	100 %	10.820,91	100 %	10.821,81	100 %	32.462,74	DPUPR	Kab. Belitung
		1 03 01 2.01	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan	7 Dokumen 100 %	9 Dokumen 100 %	25,54	9 Dokumen 100 %	26,14	9 Dokumen 100 %	26,74	27 Dokumen 100 %	78,42		
		1 03 01 2.01 001	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	5,00	2 Dokumen	5,10	2 Dokumen	5,20	6 Dokumen	15,30		
		1 03 01 2.01 002	2 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,00	1 Dokumen	2,10	1 Dokumen	2,20	3 Dokumen	6,30		
		1 03 01 2.01 003	3 Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,00	1 Dokumen	2,10	1 Dokumen	2,20	3 Dokumen	6,30		
		1 03 01 2.01 004	4 Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,00	1 Dokumen	2,10	1 Dokumen	2,20	3 Dokumen	6,30		
		1 03 01 2.01 005	5 Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,00	1 Dokumen	2,10	1 Dokumen	2,20	3 Dokumen	6,30		
		1 03 01 2.01 007	6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	3 Laporan	12,54	3 Laporan	12,64	3 Laporan	12,74	9 Laporan	37,92		
		1 03 01 2.02	2 Administral Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen keuangan sesuai peraturan	3 Dokumen 100 %	3 Dokumen 100 %	10.794,47	3 Dokumen 100 %	10.794,77	3 Dokumen 100 %	10.795,07	9 Dokumen 100 %	32.384,32		
		1 03 01 2.02 001	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran : Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	50 Orang/bulan	10.786,47	50 Orang/bulan	10.786,57	50 Orang/bulan	10.786,67	50 Orang/bulan	32.359,72		
		1 03 01 2.02 005	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3,00	1 Laporan	3,10	1 Laporan	3,20	3 Laporan	9,30		
		1 03 01 2.02 008	3 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran : Jumlah Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	5,00	2 Dokumen	5,10	2 Dokumen	5,20	6 Dokumen	15,30		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)			
						target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12)
				2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	66,37 %	67 %	340,10	69 %	340,50	71 %	340,90	71 %	1.021,50		
		1 03 01 2.05	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran : Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	49 Orang	50 Orang	340,10	50 Orang	340,50	50 Orang	340,90	50 Orang	1.021,50		
				Hasil : Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %			
		1 03 01 2.05 001	1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Keluaran : Jumlah unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	1 Unit	5,10	1 Unit	5,20	1 Unit	5,30	3 Unit	15,60		
		1 03 01 2.05 002	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran : Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	1 Paket	30,00	1 Paket	30,10	1 Paket	30,20	3 Paket	90,30		
		03 01 2.05 005	3 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dokumen	19 Dokumen	5,00	19 Dokumen	5,10	19 Dokumen	5,20	57 Dokumen	15,30		
		1 03 01 2.05 009	4 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran : jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 Orang	19 Orang	300,00	19 Orang	300,10	19 Orang	300,20	57 Orang	900,30		
				3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.454,90	100 %	1.456,00	100 %	1.457,10	100 %	4.368,00		
		1 03 01 2.06	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.081,00	100 %	1.081,70	100 %	1.082,40	100 %	3.245,10		
				Hasil : Persentase pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %			
		1 03 01 2.06 001	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Jumlah paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	5,00	1 Paket	5,10	1 Paket	5,20	3 Paket	15,30		
		1 03 01 2.06 002	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	190,00	1 Paket	190,10	1 Paket	190,20	3 Paket	570,30		
		1 03 01 2.06 003	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran : Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	9,00	1 Paket	9,10	1 Paket	9,20	3 Paket	27,30		
		1 03 01 2.06 004	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran : Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	150,00	1 Paket	150,10	1 Paket	150,20	3 Paket	450,30		
		1 03 01 2.06 005	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : Jumlah paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	62,00	1 Paket	62,10	1 Paket	62,20	3 Paket	186,30		
		1 03 01 2.06 006	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Jumlah dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	15,00	1 Dokumen	15,10	1 Dokumen	15,20	3 Dokumen	45,30		
		1 03 01 2.06 009	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran : Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	650,00	12 laporan	650,10	12 laporan	650,20	36 laporan	1.950,30		
		1 03 01 2.08	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	373,90	100 %	374,30	100 %	374,70	100 %	1.122,90		
				Hasil : Persentase pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %			
		1 03 01 2.08 001	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Keluaran : Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3,70	12 Laporan	3,80	12 Laporan	3,90	36 Laporan	11,40		
		1 03 01 2.08 002	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	144,00	12 Laporan	144,10	12 Laporan	144,20	36 Laporan	432,30		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi						
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)									
						target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)								
(1)	(2)	(1)			(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12)				
		1	03	01	2.08	003	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	27,00	12 Laporan	27,10	12 Laporan	27,20	36 Laporan	81,30		
		1	03	01	2.08	004	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran :	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	199,20	12 Laporan	199,30	12 Laporan	199,40	36 Laporan	597,90		
								4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			100 %	100 %	1.508,00	100 %	748,60	100 %	749,30	100 %	3.005,90		
		1	03	01	2.07		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran :	Jenis Barang Milik Daerah	7 Jenis	15 Jenis	670,00	12 Jenis	310,20	11 Jenis	310,50	38 Jenis	1.290,70		
								Hasil :	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %				
		1	03	01	2.07	002	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran :	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	r/a Unit	1 Unit	320,00	2 Unit	60,00	2 Unit	60,10	5 Unit	440,10		
		1	03	01	2.07	005	2	Pengadaan Mebel	Keluaran :	Jumlah paket mebel yang disediakan	4 Unit	4 Unit	50,00	3 Unit	50,10	2 Unit	50,20	9 Unit	150,30		
		1	03	01	2.07	006	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran :	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	6 Unit	9 Unit	100,00	6 Unit	100,10	6 Unit	100,20	21 Unit	300,30		
		1	03	01	2.07	011	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran :	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	r/a Unit	1 Unit	200,00	1 Unit	100,00	1 Unit	100,00	3 Unit	400,00		
		1	03	01	2.09		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran :	Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	6 Jenis	838,00	6 Jenis	438,40	6 Jenis	438,80	6 Jenis	1.715,20		
								Hasil :	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %				
		1	03	01	2.09	001	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran :	Jumlah kendaraan perorangan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit	4 Unit	40,00	4 Unit	40,10	4 Unit	40,20	12 Unit	120,30		
		1	03	01	2.09	002	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran :	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	21 Unit	21 Unit	138,00	21 Unit	138,10	21 Unit	138,20	63 Unit	414,30		
		1	03	01	2.09	005	3	Pemeliharaan Mebel	Keluaran :	Jumlah Mebel yang dipelihara	80 Unit	80 Unit	10,00	80 Unit	10,10	80 Unit	10,20	240 Unit	30,30		
		1	03	01	2.09	006	4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran :	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	65 Unit	65 Unit	50,00	65 Unit	50,10	65 Unit	50,20	195 Unit	150,30		
		1	03	01	2.09	009	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran :	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	600,00	1 Unit	200,00	1 Unit	200,00	3 Unit	1.000,00		
		1	03	02		13	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik	43,03 %	49,91 %	17.301,37	52,82 %	15.185,37	57,03 %	14.509,57	57,03 %	46.996,31	DPUPR	Kab. Belitung	
		1	03	02	2.01		1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantal pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran :	persentase SDA dan Bangunan Pengaman Pantal pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	100 %	100 %	10.288,93	100 %	8.002,93	100 %	6.827,13	100 %	25.118,99		
								Hasil :	SDA dan Bangunan Pengaman Pantal pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terkelola dengan baik	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi						
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)									
						target	Rp (t)	target	Rp (t)	target	Rp (t)	target	Rp (t)								
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12)					
		1	03	02	2.01	0120	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Keluaran :	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	3 Dokumen	4 Dokumen	400,00	2 Dokumen	200,00	2 Dokumen	200,00	8,00 Dokumen	800,00		
		1	03	02	2.01	0127	2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Keluaran :	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	n/a Dokumen	2 Dokumen	200,00	2 Dokumen	200,00	2 Dokumen	200,00	6,00 Dokumen	600,00		
		1	03	02	2.01	0115	3	Pembangunan Tanggul Sungai	Keluaran :	Panjang Tanggul Sungai yang dibangun	n/a Km	0,500 Km	1.168,00	0,500 Km	1.168,00	0,500 Km	1.168,00	1,50 Km	3.504,00		
		1	03	02	2.01	0109	4	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Keluaran :	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,1035 Km	0,300 Km	1.375,80	0,300 Km	1.375,80	- Km	-	0,60 Km	2.751,60		
		1	03	02	2.01	0114	5	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Keluaran :	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	n/a unit			2 Unit	400,00	2 Unit	400,00	4,00 Unit	800,00		
		1	03	02	2.01	0126	6	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Keluaran :	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0,06 Km	0,400 Km	775,20	0,400 Km	775,20	0,400 Km	775,20	1,20 Km	2.325,60		
		1	03	02	2.01	0110	7	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Keluaran :	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0,154 Km			0,200 Km	558,80	0,200 Km	558,80	0,40 Km	1.117,60		
		1	03	02	2.01	0103	8	Peningkatan Tanggul Sungai	Keluaran :	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	0,283 Km	1,000 Km	3.806,00	0,200 Km	761,20	0,200 Km	761,20	1,40 Km	5.328,40		
		1	03	02	2.01	0101	9	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Keluaran :	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	n/a Km	0,200 Km	917,20	0,200 Km	917,20	0,200 Km	917,20	0,60 Km	2.751,60		
		1	03	02	2.01	0071	10	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Keluaran :	Panjang Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	n/a Unit	2,000 Unit	400,00	2,000 Unit	400,00	3,000 Unit	600,00	7,00 Unit	1.400,00		
		1	03	02	2.01	0073	11	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Keluaran :	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	n/a Km	3,000 Km	1.182,00	3,000 Km	1.182,00	3,000 Km	1.182,00	9,00 Km	3.546,00		
		1	03	02	2.01	0072	12	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran :	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	64,73	1 Dokumen	64,73	1 Dokumen	64,73	3,00 Dokumen	194,19		
		1	03	02	2.02		2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran :	Persentase Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Dikelola dengan Baik	100 %	100 %	7.012,44	100 %	7.182,44	100 %	7.682,44	100 %	21.877,32		
								Hasil :	Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 yang dikelola dengan baik	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %				
		1	03	02	2.02	0035	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Keluaran :	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	5 Dokumen	2 Dokumen	200,00	2 Dokumen	200	2 Dokumen	200	6,000 Dokumen	600,00		
		1	03	02	2.02	0002	2	Pembangunan Jaringan irigasi Permukaan	Keluaran :	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun	0,49 Km	0,170 Km	397,12	0,170 Km	397,12	0,170 Km	397,12	0,510 Km	1.191,36		
		1	03	02	2.02	0008	3	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Keluaran :	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,224 Km	0,700 Km	1.635,20	0,700 Km	1.635,20	0,700 Km	1.635,20	2,100 Km	4.905,60		
		1	03	02	2.02	0014	4	Rehabilitasi jaringan irigasi Permukaan	Keluaran :	panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	0,125 Km	0,240 Km	465,12	0,240 Km	465,12	0,240 Km	465,12	0,720 Km	1.395,36		
		1	03	02	2.02	0014	5	Rehabilitasi jaringan irigasi Permukaan (DAK)	Keluaran :	panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	n/a Km	10,138 Km	3.330,00	10,800 Km	3.500,00	11,200 Km	4.000,00	32,138 Km	10.830,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi						
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)									
						target	Rp (t)	target	Rp (t)	target	Rp (t)	target	Rp (t)								
(1)	(2)	(1)			(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12)				
		1	03	02	202	0021	6	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Keluaran :	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,731 Km	2,500 Km	985,00	2,500 Km	985,00	2,500 Km	985,00	7,500 Km	2.955,00		
		1	03	03				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman	16,52 %	18,30 %	9.832,10	19,75 %	11.264,38	21,51 %	13.189,02	21,51 %	34.285,49	DPUPR	Kab. Belitung
		1	03	03	2.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran :	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan an Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	9.832,10	100 %	11.264,38	100 %	13.189,02	100 %	34.285,49		
								Hasil :	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola dengan baik	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %				
		1	03	03	2.01	0025	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Keluaran :	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	350,00	1 Dokumen	300,00	1 Dokumen	300,00	3 Dokumen	950,00		
		1	03	03	2.01	0032	2	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Keluaran :	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	532 SR	945 SR	4.982,10	1086 SR	5.964,38	1186 SR	7.389,02	3.217 SR	18.335,49		
		1	03	03	2.01	0029	3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Keluaran :	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	17 Unit	18 Unit	4.500,00	19 Unit	5.000,00	19 Unit	5.500,00	56.000 Unit	15.000,00		
		1	03	05		2		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase Jumlah rumah dengan sistem pengolahan limbah domestik	n/a	8,20 %	3.800,00	8,69 %	3.800,00	9,16 %	3.800,00	9,16 %	11.400,00	DPUPR	Kab. Belitung
		1	03	05	2.01			1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota	Keluaran :	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota	100 %	100 %	3.800,00	100 %	3.800,00	100 %	3.800,00	100 %	11.400,00		
								Hasil :	Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota yang dikelola dengan baik	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %				
		1	03	05	2.01	0041	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Keluaran :	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	n/a Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	3,000 Dokumen	300,00		
		1	03	05	2.01	0039	2	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Keluaran :	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	335 Rumah Tangga	250 Rumah Tangga	3.600,00	250 Rumah Tangga	3.600,00	250 Rumah Tangga	3.600,00	750.000 Rumah Tangga	10.800,00		
		1	03	05	2.01	0040	3	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Keluaran :	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	n/a Orang	100 Orang	100,00	100 Orang	100,00	100 Orang	100,00	300,00 Orang	300,00		
		1	03	06		3		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	20,02 %	22,00 %	1.800,00	29,59 %	1.800,00	39,57 %	1.800,00	39,57 %	5.400,00	DPUPR	Kab. Belitung
		1	03	06	2.01			1 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran :	Panjang Saluran drainase lingkungan	1515 m	1507 m	1.800,00	1507 m	1.800,00	1507 m	1.800,00	4.521 M2	5.400,00		
								Hasil :	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi						
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)									
						target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)								
(1)	(2)	(1)		(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12)					
		1	03	06	2.01	0029	1	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Keluaran :	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	n/a	5 Sistem Drainase Perkotaan	1.000,00	5 Sistem Drainase Perkotaan	1.000,00	5 Sistem Drainase Perkotaan	1.000,00	15 Sistem Drainase Perkotaan	3.000,00		
		1	03	06	2.01	0024	2	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Keluaran :	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	n/a	1 Sistem Drainase Perkotaan	200,00	1 Sistem Drainase Perkotaan	200,00	1 Sistem Drainase Perkotaan	200,00	3 Sistem Drainase Perkotaan	600,00		
		1	03	06	2.01	0012	3	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Keluaran :	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1515 M	1500 M	500,00	1500 M	500,00	1500 M	500,00	4.500 M	1.500,00		
		1	03	06	2.01	0028	4	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Keluaran :	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	n/a	1 Sistem Drainase Perkotaan	100,00	1 Sistem Drainase Perkotaan	100,00	1 Sistem Drainase Perkotaan	100,00	3 Sistem Drainase Perkotaan	300,00		
		1	03	08		5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar	n/a %	4,79 %	2.270,00	5,22 %	2.270,00	5,64 %	2.270,00	5,64 %	6.810,00	DPUPR	Kab. Belitung
		1	03	08	2.01		1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Lalk Fungsi Bangunan Gedung	Keluaran :	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Lalk Fungsi Bangunan Gedung	100 %	100 %	2.270,00	100 %	2.270,00	100 %	2.270,00	100 %	6.810,00		
									Hasil :	Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang terselesaikan dengan baik	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %			
		1	03	08	2.01	0023	1	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Lalk Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Keluaran :	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Lalk Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	61 Dokumen	200 Dokumen	970,00	200 Dokumen	970,00	200 Dokumen	970,00	600,000 Dokumen	2.910,00		
		1	03	08	2.01	0021	2	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran :	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	n/a Dokumen	2 Dokumen	200,00	2 Dokumen	200,00	2 Dokumen	200,00	6,000 Dokumen	600,00		
		1	03	08	2.01	0022	3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Keluaran :	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	n/a orang	20 Orang	100,00	20 Orang	100,00	20 Orang	100,00	60,000 Orang	300,00		
		1	03	08	2.01	0017	6	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran :	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	n/a Unit	5 Bangunan Gedung	1.000,00	5 Bangunan Gedung	1.000,00	5 Bangunan Gedung	1.000,00	15,000 Bangunan Gedung	3.000,00		
		1	03	09		6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			Persentase Tertatanya Bangunan dan Lingkungan	15,00 %	33,33 %	300,00	46,67 %	500,00	60,00 %	500,00	60,00 %	1.300,00	DPUPR	Kab. Belitung
		1	03	09	2.01		1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran :	Dokumen Perencanaan penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1 Dokumen	300	1 Dokumen	500	3 Dokumen	500	5 Dokumen	1300		
									Hasil :	Perencanaan penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota yang terselesaikan dengan baik	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %			
		1	03	09	2.01	0010	1	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran :	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1,00 Dokumen	100,00	1,00 Dokumen	300,00	3,00 Dokumen	300,00	5,000 Dokumen	700,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi											
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)														
						target	Rp (t)	target	Rp (t)	target	Rp (t)	target	Rp (t)													
(1)	(2)	(1)			(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12)									
		1	03	09	2.01	0007	2	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Keluaran :	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	n/a	Kawasan	1,00	Dokumen	100,00	1,00	Dokumen	100,00	1,00	Dokumen	100,00	3,000	Dokumen	300,00		
		1	03	09	2.01	0008	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Keluaran :	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	n/a	Kawasan	1,00	Kawasan	100,00	1,00	Kawasan	100,00	1,00	Kawasan	100,00	3,000	Kawasan	300,00		
		1	03	10		12		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase jalan standar kabupaten	26,75 %		28,25	129.561,00	29,00 %	167.857,15	29,760 %	125.025,25	29,76 %	422.443,40			DPUPR	Kab. Belitung		
		1	03	10	2.01		1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Keluaran :	Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	100 %		100 %	129.561,00	100 %	167.857,15	100 %	125.025,25	100 %	422.443,40						
									Hasil :	Tersedianya Jalan kabupaten yang dikelola dengan baik	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %							
		1	03	10	2.01	0029	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Keluaran :	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	17	Dokumen	8	Dokumen	1.200,00	12	Dokumen	1.800,00	8	Dokumen	1.200,00	28,00	Dokumen	4.200,00		
		1	03	10	2.01	0028	3	Pengelolaan Leger Jalan	Keluaran :	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1	Dokumen	1	Dokumen	192,22	1	Dokumen	192,22	1	Dokumen	192,22	3,00	Dokumen	576,66		
		1	03	10	2.01	0043	4	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Keluaran :	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	667,066	Km	667,07	Km	500,00	667,07	Km	500,00	667,07	Km	500,00	2.001,20	Km	1.500,00		
		1	03	10	2.01	0032	5	Pembangunan Jalan	Keluaran :	Panjang jalan yang dibangun	13,41	Km	8,78	Km	37.472,73	5,05	Km	36.160,41	14,51	Km	60.304,38	28,34	Km	133.937,52		
		1	03	10	2.01	0037	6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Keluaran :	Panjang jalan yang dilakukan pelebaran menuju standar	3,5	Km	10,38	Km	38.492,56	14,79	Km	54.421,48	2,50	Km	10.030,00	27,67	Km	102.944,04		
		1	03	10	2.01	0034	7	Pemeliharaan Berkala Jalan	Keluaran :	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5,56	Km	22,54	Km	34.555,17	33,61	Km	51.537,57	26,14	Km	40.084,61	82,29	Km	126.177,35		
		1	03	10	2.01	0046	8	Pemeliharaan Rutin Jalan	Keluaran :	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	580,67	Km	666,02	Km	12.114,04	666,02	Km	12.114,04	666,02	Km	12.114,04	666,02	Km	36.342,12		
		1	03	10	2.01	0040	9	Pembangunan Jembatan	Keluaran :	Jumlah Jembatan yang Dibangun	n/a	jembatan	2,00	jembatan	4.434,29	1,00	jembatan	10.531,43				3,00	jembatan	14.965,71		
		1	03	10	2.01	0038	10	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Keluaran :	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	3	jembatan	9,00	jembatan	600,00	9,00	jembatan	600,00	9,00	jembatan	600,00	9,00	jembatan	1.800,00		
		1	03	11		7		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten	60 %		60,00 %	1.744,20	60,00 %	1.278,02	60,00 %	1.377,13	60,00 %	4.397,36			DPUPR	Kab. Belitung		
		1	03	11	2.01		1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Keluaran :	Jumlah Peserta yang Mengikuti pelatihan	40,00	Orang	35,00	Orang	200,00	35,00	Orang	220,00	35,00	Orang	242,00	105,00	Orang	682,00		
									Hasil :	Tenaga Terampil bersertifikat	75,00 %		75,00 %		75,00 %		75,00 %		75,00 %		75,00 %					
		1	03	11	2.01	0016	1	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Keluaran :	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	35	Orang	35,00	Orang	200,00	35	Orang	220,00	35	Orang	242,00	105,00	Orang	662,00		
		1	03	11	2.02		2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran :	Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi tingkat kabupaten	n/a	Laporan	1,00	Laporan	30,60	1	Laporan	33,66	1	Laporan	37,03	1	Laporan	101,29		
									Hasil :	Informasi Jasa Konstruksi tingkat kabupaten			75,00 %		75,00 %		75 %		75 %		75 %					
		1	03	11	2.02	0013	1	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Keluaran :	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	n/a	Dokumen	1,00	Dokumen	30,60	1	Dokumen	33,66	1	Dokumen	37,03	3,00	Dokumen	101,29		
		1	03	11	2.04		3	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Keluaran :	Laporan Hasil Ketaatan Peraturan Jasa Konstruksi	n/a	Laporan	2,00	Laporan	1.513,60	2,00	Laporan	1.022,38	2,00	Laporan	1.098,10	6	Laporan	3.634,07		
									Hasil :	Ketaatan Peraturan Jasa Konstruksi			75,00 %		75,00 %		75,00 %		75,00 %		75 %					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)					
						target	Rp (t)	target	Rp (t)	target	Rp (t)	target	Rp (t)				
(1)	(2)	(4)			(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12)	
		1 03 11 2.04 0008	1 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Keluaran : Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	n/a Dokumen	1,00	Dokumen	17,50					1,00	Dokumen	17,50		
		1 03 11 2.04 0004	2 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	n/a Paket Pekerjaan	1,00	Paket Pekerjaan	1.496,10	15	Paket Pekerjaan	19,25	15	Paket Pekerjaan	21,18	30,00	Paket Pekerjaan	40,43
		1 03 11 2.04 0005	3 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	n/a Bangunan Konstruksi				15,00	Bangunan Konstruksi	1.003,11	15,00	Bangunan Konstruksi	1.076,93	30,00	Bangunan Konstruksi	3.576,14
		1 03 12 14	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian penataan ruang	98,24 %	100 %	2.235,00	100 %	2.030,00	100 %	2.080,00	100 %	6.345,00	DPUPR	Kab. Belitung		
		1 03 12 2.01	1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Keluaran : Dokumen tata ruang Hasil : Tersedianya rencana tata ruang yang sesuai dengan peraturan	2 Dokumen 100 %	6 Dokumen 100 %	325,00	5 Dokumen 100 %	235,00	4 Dokumen 100 %	225,00	15,00 100 %	Dokumen 785,00				
		1 03 12 2.01 0005	1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1	Dokumen	90,00				1,00	Dokumen	90,00			
		1 03 12 2.01 0006	2 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1	Dokumen	65,00	1	Dokumen	65,00	1	Dokumen	65,00	3,00	Dokumen	195,00
		1 03 12 2.01 0010	3 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	n/a Dokumen	1	Dokumen	50,00	1	Dokumen	50,00	1	Dokumen	50,00	3,00	Dokumen	150,00
		1 03 12 2.01 0007	4 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Keluaran : Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Dokumen	3	Publikasi	120,00	3	Publikasi	120,00	2	Publikasi	110,00	8,00	Publikasi	350,00
		1 03 12 2.02	2 koordinael dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Dokumen perencanaan tata ruang Hasil : Perencanaan tata ruang yang terkoordinasi dan tersinkronisasi dengan baik	2 Dokumen 100 %	3 Dokumen 100 %	1.050,00	0 Dokumen 100 %	975,00	0,00 Dokumen 100 %	1.025,00	3,00 100 %	Dokumen 3.050,00				
		1 3 12 2.02 0002	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	n/a Dokumen	3	Dokumen	1.050,00				3,00	Dokumen	1.050,00			
		1 3 12 2.02 0004	2 Penyusunan Peta Dasar	Keluaran : Jumlah data SHP Peta Dasar	n/a Peta				1	Peta	150,00	1	Peta	150,00	2,00	Peta	300,00
		1 3 12 2.02 0005	3 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	n/a Dokumen				1	Dokumen	825,00	1	Dokumen	875,00	2,00	Dokumen	1.700,00
		1 03 12 2.03 03	3 Koordinael dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Dokumen penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang Hasil : Pemanfaatan tata ruang yang terkoordinasi dan tersinkronisasi dengan baik	3 100 %	5 Dokumen 100 %	800,00	17 Dokumen 100 %	750,00	17 Dokumen 100 %	750,00	39,00 100 %	Dokumen 2.300,00				
		1 03 12 2.03 0005	1 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Keluaran : Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 Dokumen	4	Dokumen	700,00				4,00	Dokumen	700,00			
		1 03 12 2.03 0004	2 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Keluaran : Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	n/a Layanan				16	Layanan	650,00	16	Layanan	650,00	32,00	Layanan	1.300,00
		1 03 12 2.03 0006	3 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Keluaran : Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	n/a Dokumen	1	Dokumen	100,00	1	Dokumen	100,00	1	Dokumen	100,00	3,00	Dokumen	300,00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi						
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)									
						target	Rp (lt)	target	Rp (lt)	target	Rp (lt)	target	Rp (lt)								
(1)	(2)	(1)			(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12)				
		1	03	12	2.04		4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Hasil : Ketaatan terhadap RTRW	1 Dokumen	1 Dokumen	60,00	1 Dokumen	70,00	1 Dokumen	80,00	3,00 Dokumen	210,00			
		1	03	12	2.04	0004	1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	60,00	1 Dokumen	70	1 Dokumen	80,00	3,00 Dokumen	210,00			
								Pemenuhan PSU Perumahan		n/a %	64,52 %	25.750,95	65,54 %	27.080,93	66,56 %	28.816,50	66,56	81.648,37			
	1.1.2. Meningkatnya Infrastruktur Perumahan																				
		1	04	02			8	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana	n/a %	100 %	369,95	100 %	386,95	100 %	405,64	100 %	1.162,53	DPUPR	Kab. Belitung	
		1	04	02	2.01		1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Keluaran : Dokumen perencanaan pengembangan perumahan Hasil : tersedianya dokumen perencanaan pengembangan perumahan	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00	2 Dokumen	200,00	2 Dokumen	200,00	6 Dokumen	600,00			
		1	04	02	2.01	0004	1	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Keluaran : Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	3,00 Dokumen	300,00			
		1	04	02	2.01	0006	2	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Keluaran : Jumlah Dokumen data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	n/a Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	3,00 Dokumen	300,00			
		1	04	02	2.03		2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Keluaran : Rumah layak huni bagi korban bencana Hasil : Tersedianya rumah korban bencana yang layak	n/a Unit Rumah	2 Unit Rumah	169,95	2,00 Unit Rumah	186,95	2 Unit Rumah	205,64	6 Unit Rumah	562,53			
		1	04	02	2.03	0004	1	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Keluaran : Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	n/a Unit Rumah	2 Unit Rumah	169,95	2 Unit Rumah	186,95	2 Unit Rumah	205,64	6,00 Unit Rumah	562,53			
		1	04	03			9	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan Luasan kawasan kumuh	0,34 %	0,20 %	12.747,43	0,18 %	13.514,50	0,16 %	14.478,79	0,16 %	40.740,72	DPUPR	Kab. Belitung	
		1	04	03	2.02		1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Keluaran : Dokumen penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh Hasil : Tertatanya dan meningkatnya kualitas permukiman kumuh	2 Dokumen	3 Dokumen	247,43	3 Dokumen	389,50	3 Dokumen	697,54	9 Dokumen	1.334,47			
		1	04	03	2.02	0014	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Perumahan Kumuh	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Perumahan Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00	1 Dokumen	20,00	1 Dokumen	20,00	3,00 Dokumen	60,00			
		1	04	03	2.02	0008	2	Penyusunan / Review / Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	227,43	3 Dokumen	369,50	3 Dokumen	677,54	7,00 Dokumen	974,47			
		1	04	03	2.03		3	Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Keluaran : Persentase Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Hasil : Meningkatnya kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	n/a %	100 %	12.500,00	100 %	13.125,00	100 %	13.781,25	100 %	39.406,25			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi				
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)							
						target	Rp (t)	target	Rp (t)	target	Rp (t)	target	Rp (t)						
(1)	(2)	(1)			(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12)		
		1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Keluaran : Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	7,68 Ha	7,68 Ha	12.500,00	7,68 Ha	13.125,00	7,68 Ha	13.781,25	7,68 Ha	39.406,25		
		1	04	04		10	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan dan pencegahan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh	99,66 %	99,80 %	1.301,45	99,82 %	1.564,07	99,84 %	2.026,27	99,84 %	4.891,79	DPUPR	Kab. Belitung
		1	04	04	2.01		1 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Luasan rumah layak huni yang diperbaiki Hasil : Meningkatnya kualitas rumah layak huni	797 m2 100 %	540 m2 100 %	1.301,45	600 m2 100 %	1.564,07	720 m2 100 %	2.026,27	1.860 m2 100 %	4.891,79		
		1	04	04	2.01	0001	1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	24 Unit Rumah	18 Unit Rumah	1.301,45	20,00 Unit Rumah	1.564,07	24 Unit Rumah	2.026,27	62,00 Unit Rumah	4.891,79		
		1	04	05		11	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	persentase PSU yang dikelola	44,90 %	66,02 %	11.332,11	69,84 %	11.615,42	73,66 %	11.905,80	73,66 %	34.853,33	DPUPR	Kab. Belitung
		1	04	05	2.01		1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Keluaran : Persentase penanganan PSU Hasil : Meningkatnya kualitas PSU Perumahan	100 % 100 %	100 % 100 %	11.332,11	100 % 100 %	11.615,42	100 % 100 %	11.905,80	100 % 100 %	34.853,33		
		1	04	05	2.01	0001	1 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	3,00 Dokumen	300,00		
		1	04	05	2.01	0002	2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Keluaran : Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	38 Lokasi	31 Lokasi	11.232,11	33 Lokasi	11.515,42	35 Lokasi	11.805,80	99,00 Lokasi	34.553,33		
							TOTAL				208.717,634		246.429,857		206.736,574		661.884,065		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa dengan memperhatikan tugas dan fungsi pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, maka indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan fungsi penunjang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas PUPR yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode RPD
	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Indikator Tujuan					
Pemenuhan infrastruktur kePuan dan permukiman	n/a	45,34%	46,55%	47,96%	47,96%
Indikator Sasaran					
Pemenuhan Infrastruktur ke-Puan	n/a	26,17%	27,57%	29,36%	29,36%
Indikator Sasaran					
Pemenuhan PSU Permukiman	n/a	64,52%	65,54%	66,56%	66,56%



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung tahun 2024-2026 disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Proses Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung telah sesuai dengan **Peraturan Bupati Belitung Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung** untuk memastikan pencapaian kinerja strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan arahan, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan selanjutnya sebagai tolok ukur kinerja pelaksanaan perangkat daerah.

Jika di kemudian hari terdapat penyesuaian kebijakan pembangunan yang berdampak terhadap rencana strategis perangkat daerah maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanjungpandan, 2023
Kepala Dinas,

EDI USDIANTO, ST
NIP. 197505182001121004